REVIEW
RENSTRA
RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017 - 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat tersusun *Review* Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat digunakan untuk mengarahkan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra yang berkualitas menunjukkkan kemampuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi, dan agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* (termasuk Forum *Multi Stakeholder* Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat) untuk mencapai tujuan Renstra melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.

Semoga dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini bermanfaat dan dapat dipahami, sehingga capaian kinerja dapat terukur untuk menjamin keberhasilan implementasinya.

Pangkalan Bun, September 2019
Sekretaris Daerah
Kab. Kotawaringin Barat,

SUYANTO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 8
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah 24
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah 42
2.4.1 Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah 42
2.4.2 Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah 44
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 45
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tujuan dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah 45
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 48
3.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 48
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provins/Kab./Kota 51
3.3.1 Telaah Renstra Sekretariat Negara 51
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi Kalteng Tahun 2016-2021 52
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 53
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 56
4.1 Tujuan 56
4.2 Sasaran 56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 66
5.1 Strategi 66
5.2 Arah Kebijakan 72

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 80
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 90
BAB VIII PENUTUP 92

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kab. Ktw. Barat Tahun 2019 24
Tabel 2.2 Data Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat menurut Status, Pangkat dan Golongan 25
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai menurut Status dan Tingkat Pendidikan Th. 2019..... 27
Tabel 2.4 Data Sarana dan PrasaranaawalTahun 2019..... 28
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Ktw. Barat Tahun 2012 – 2016 29
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Ktw. Barat..... 34
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 46
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 58
Tabel 5.1 Identifikasi *SWOT*..... 66
Tabel 5.2 Alternatif Strategi berdasarkan Analisis *SWOT* 68
Tabel 5.3 Perumusan Strategi sesuai Perspektif Balanced Scorecard 70
Tabel 5.4 Tahun Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Tematik Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Ktw. Barat 73
Tabel 5.5 Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kab. Ktw. Barat 77
Tabel T-C-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 91

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah 2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tipe A
Kab. Kotawaringin Barat 11
Gambar 3.1 Enam Misi Pemerintah Kab. Ktw. Barat Tahun 2017-2022 49
Gambar 7.1 Pohon Kinerja Pencapaian Misi I Kab. Kotawaringin Barat 90
Gambar 7.2 Pohon Kinerja Pencapaian Misi IV Kab. Kotawaringin Barat 91

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 telah ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2018 melalui Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Berkenaan dengan kondisi tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan *review* dan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Review Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang dilakukan mencakup :

1. Penyempurnaan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
2. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
3. Pemutakhiran alokasi pagu anggaran per program dan kegiatan

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini mengamanatkan bahwa penyusunan Renstra di Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat merupakan rencana induk yang komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah akan mencapai tujuannya.

Kemudian Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Renstra dan pagu indikatif, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. RKA menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran, yang selanjutnya menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yang disingkat dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Keterkaitan antar dokumen perencanaan di daerah dapat dilihat pada Gambar 1.

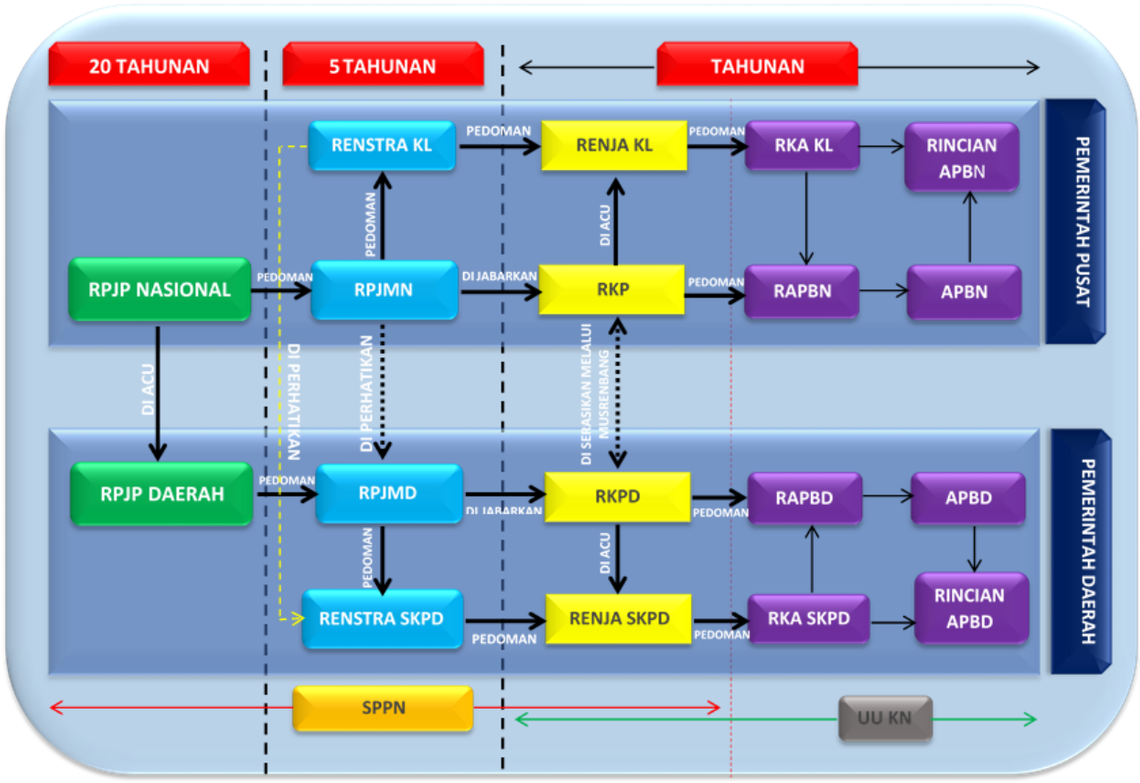

Sumber : www.bappenas.go.id

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan tugas sebagai unsur staf pendukung Kepala Daerah. Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya. Sesuai amanat pasal 213 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 peran Sekretariat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan melakukan koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Hal ini menuntut kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015–2035;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2).

29. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan *Review* Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022.

Review Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Memberikan instrumen pegukuran kinerja pelayanan SKPD.
3. Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi Renstra Sekretariat Daerah.
4. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan naskah *Review* Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2017–2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Stategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka Menengah Sekretariat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah;
4. Pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Pengoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
2. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
3. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
4. pengoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah daerah; dan
5. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah;

2. Asisten Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
   a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
      3) Sub Bagian Hubungan Kerjasama.
   b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Pembinaan Mental Spiritual;
      2) Sub Bagian Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
      3) Sub Bagian Pembinaan Kemasyarakatan.
   c. Bagian Hukum, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan,
      2) Sub Bagian Evaluasi Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum; dan
      3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi.

3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
   a. Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Promosi, Investasi, Pengendalian dan Sarana Perekonomian;
      2) Sub Bagian Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Produksi dan Budidaya; dan
      3) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah
   b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
      2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan; dan
      3) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan.
   c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Pengembangan SDM;
      2) Sub Bagian Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa; dan
      3) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
   a. Bagian Organisasi, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah, dan Analisis Jabatan dan dan Beban Kerja;
      2) Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian; dan

3) Sub Bagian Tatalaksana.

b. Bagian Umum, terdiri dari :

1) Sub Bagian Rumah Tangga Dan Aset;
2) Sub Bagian Administrasi Keuangan; dan
3) Sub Bagian Tata Usaha.

c. Bagian Protokol dan Komunikasi, terdiri dari :

1) Sub Bagian Protokol;
2) Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi; dan
3) Sub Bagian Peliputan dan Publikasi.

5. Kelompok Jabatan

Kelompok jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kotawaringin Barat

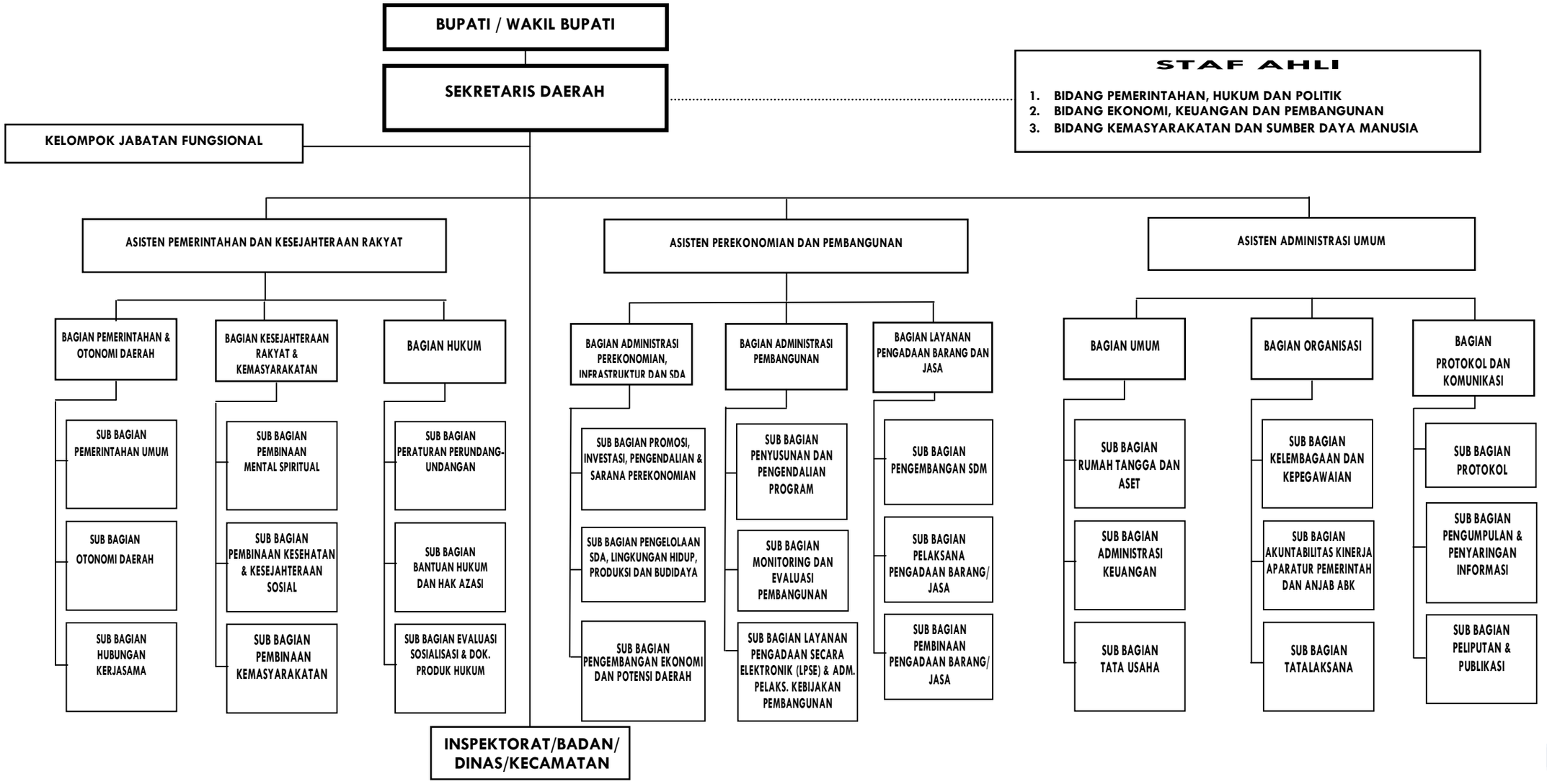

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR SEKRETARIAT DAERAH

1. SEKRETARIS DAERAH

a. Tugas :

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin Sekretariat Daerah, membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, serta mengusulkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

b. Fungsi :

1) Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
4) Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
5) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah; dan
6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Tugas :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas atas penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan kerjasama, mengoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan daerah, merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan strategis bidang penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah dan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

2) Perumusan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
3) Penyusunan perencanaan strategis bidang administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
4) Pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
5) Pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang kesejahteraan rakyat;
6) Perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan daerah;
7) Pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah;
8) Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
3. Kepala Bagian Hukum.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

a. Tugas :

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan kerja sama, kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

1) Pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan urusan tata usaha bagian, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penetapan dan penegasan batas antar Kabupaten/Kota, keberadaan unsur rupa bumi (toponimi);

2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi Pejabat Negara/Daerah, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan wilayah dan daerah;
3) Pengoordinasian pelaksanaan hubungan kerja sama antar lembaga, hubungan kerja sama antar daerah dan regional, hubungan kerja sama luar negeri;
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Pemerintahan umum;
2. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah;
3. Kepala Sub Bagian Hubungan Kerjasama.

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

a. Tugas :

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pembinaan mental spiritual, pembinaan sosial, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kesehatan dan kesejahteraan serta penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina mental spiritual, bina sosial dan bina kemasyarakatan serta bina kesehatan dan kesejahteraan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
2) Penyusunan bahan perencanaan strategis bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
3) Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang bina mental spiritual, bina sosial, bina kemasyarakatan serta bina kesehatan dan kesejahteraan;

4) Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bina mental spiritual, bina sosial, bina kemasyarakatan serta kesehatan dan kesejahteraan;
5) Penyusunan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Pembinaan Mental Spiritual;
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
3. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kemasyarakatan.

KEPALA BAGIAN HUKUM

a. Tugas :

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan, penyusunan, menelaah, meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, memberikan bantuan hukum, publikasi atau penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum, penyerasian, penyelarasan, harmonisasi rancangan produk hukum daerah, pengundangan, dokumentasi dan informasi hukum, publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah, bantuan hukum, koordinasi pemenuhan hak asasi manusia pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

1) Menyusun perencanaan program kegiatan koordinasi perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah;
2) Melaksanakan perumusan, penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah;
3) Memberikan layanan dan konsultasi hukum dan HAM serta bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah dan yang tersangkut perkara dalam kedinasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4) Melaksanakan Publikasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum;

5) Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat;
6) Memberikan pertimbangan hukum dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di bidang hukum dan perundang-undangan;
7) Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis di bidang hukum dan perundang-undangan;
8) Mengadakan harmonisasi dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksananya;
9) Pengoordinasian penyusunan penyerasian, penyelarasan, harmonisasi rancangan produk hukum daerah;
10) Pengkajian dan penelaahan hukum;
11) Pengundangan produk hukum daerah;
12) Penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum, publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah;
13) Penyelenggaraan bantuan hukum;
14) Pelaksanaan koordinasi pemenuhan hak asasi manusia;
15) Pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah;
16) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Hukum.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Hukum terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Evaluasi, Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum;
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; dan
3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi

3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

a. Tugas :

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan strategis bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi, pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, pembangunan daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
2) Penyusunan perencanaan strategis bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
3) Pengoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
4) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
5) Pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
6) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
2. Kepala Bagian Bagian Administrasi Pembangunan;
3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

a. Tugas :

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana Sekretariat Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Bagian dan mempunyai tugas pokok menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk serta memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan di bidang pengembangan ekonomi daerah dan potensi daerah perekonomian dan sumber daya alam, penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk di bidang perekonomian dan sumber daya alam serta memantau perkembangannya, pelaporan bidang bina promosi, investasi dan pengendalian, bina sarana perekonomian, bina pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, bina produksi dan budidaya.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
2) Penyusunan pengembangan ekonomi daerah dan potensi daerah;
3) Bahan perencanaan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
4) Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelaksanaan administrasi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
5) Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
6) Penyusunan penyelenggaraan sistem informasi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;
8) Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang pembinaan pariwisata, promosi, investasi dan pengendalian;
9) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, pengelolaan produksi dan budidaya;
10) Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang pembinaan pengembangan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, pengelolaan produksi dan budidaya;
11) Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan pengembangan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, pengelolaan produksi dan budidaya;
12) Penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bagian administrasi perekonomian, infrastruktur dan sumber daya alam.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Promosi, Investasi, Pengendalian dan Sarana Perekonomian;

2. Kepala Sub Bagian Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Produksi dan Budidaya; dan
3. Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah dan Potensi Daerah.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a. Tugas :

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang administrasi pembangunan, pengelolaan dan pengadaan barang.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengadaan barang dan administrasi pembangunan;
2) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang;
3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pembangunan;
4) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi pembangunan; dan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
2. Kepala Sub Bagian Pembangunan; dan
3. Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan.

KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

a. Tugas :

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasamempunyai tugaspelaksanaan pembinaan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pengadaan

barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBD/APBN/Hibah/DLN di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

1) Pelaksanaan kebijakan, regulasi, norma, standar dan prosedur dalam bidang pengadaan barang dan jasa;
2) Perumusan bahan strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi, profesi di bidang pengelolaan barang dan jasa pemerintah;
3) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, advokasi, pendapat atau rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
4) Perumusan kebijakan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
5) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
6) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas, perencanaan, informasi, pengaduan, monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil proses pengadaan barang dan jasa;
7) Penyelenggaraan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya;
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM;
2. Kepala Sub Bagian Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa.

4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

a. Tugas :

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang Aparatur, Keuangan, Pelayanan Umum, Organisasi, Protokol, Kerjasama, Komunikasi, Pelayanan Umum dan Sarana Prasarana.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang Aparatur, Keuangan, Pelayanan Umum dan Sarana Prasarana
2) Penyiapan rencana dan program pembinaan Aparatur, Keuangan, Pelayanan Umum dan Sarana Prasarana
3) Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang Aparatur, Keuangan, Pelayanan Umum dan Sarana Prasarana
4) Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pembinaan Aparatur, Keuangan, Pelayanan Umum dan Sarana Prasarana
5) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Aparatur, Keuangan, Pelayanan Umum dan Sarana Prasarana;
6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Administrasi Umum dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Organisasi;
2. Kepala Bagian Umum; dan
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

a. Tugas :

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi dan informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan, kepegawaian dan analisis jabatan serta tata laksana.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi;
2) Penyusunan bahan perencanaan strategis bidang di bidang organisasi;

3) Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tata laksana;
4) Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tata laksana;
5) Penyusunan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tata laksana;
6) Pelaksanaan urusan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
7) Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Organisasi, terdiri dari:

1. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah, Analisis Jabatan dan dan Beban Kerja;
2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian; dan
3. Kepala Sub Bagian Tatalaksana

KEPALA BAGIAN UMUM

a. Tugas :

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan penyiapan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas Bagian Umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan lingkup Sekretariat Daerah dan ketatausahaan pimpinan, Perjalanan Dinas, kearsipan, penatausahaan keuangan, verifikasi dan akuntansi, pelaksanaan urusan rumah tangga dan Perjalanan Dinas, perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah serta koordinasi penyusunan program dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang tugas bagian umum;

2) Penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang tugas bagian umum;
3) Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang tata usaha lingkup sekretariat daerah dan tata usaha pimpinan, tata usaha keuangan, perlengkapan dan aset sekretariat daerah, rumah tangga, perjalanan dinas sekretariat daerah;
4) Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang tata usaha, tata usaha keuangan, perlengkapan perlengkapan dan aset sekretariat daerah, rumah tangga;
5) Pelaksanaan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat pada umumnya di daerah;
6) Penyiapan acara dinas para pimpinan pemerintah daerah dan penerimaan tamu-tamu pemerintah daerah sesuai kebutuhan;
7) Penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha lingkup sekretariat daerah dan tata usaha pimpinan, tata usaha keuangan, perlengkapan perlengkapan dan aset sekretariat daerah, rumah tangga;
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Umum terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset;
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan; dan
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI

a. Tugas :

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi mempunyai tugas pembinaan, pengoordinasian, pengembangan dan pembinaan administrasi dan sumberdaya dibidang penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi publik guna pemantapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

b. Fungsi **:**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi, menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan peraturan dan teknis pembinaan pengembangan keprotokolan dan komunikasi publik;

2) Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3) Pengumpulan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di bidang keprotokolan dan komunikasi publik;
4) Penyiapan agenda pimpinan Pemerintah Kabupaten dan penerimaan tamu-tamu Pemerintah Kabupaten ;
5) Penyiapan tenaga protokol pimpinan, protokol tamu dan acara sesuai kebutuhan;
6) Pembinaan administrasi dan sumber daya dibidang keprotokolan dan komunikasi publik;
7) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang keprotokolan dan komunikasi publik; dan
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi, terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Protokol;
2. Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi; dan
3. Kepala Sub Bagian Peliputan dan Publikasi.

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH

KEPEGAWAIAN

1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2019 adalah sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) orang. Tabel 2.1 berikut ini menggambarkan komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	PNS	HONORER DAERAH	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Asisten I, II dan III	1	-	1
3	Staf Ahli	2	-	2
4	Sekretaris KPU Kabupaten Kotawaringin	1	-	1

	Barat			
5	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12	3	15
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan	8	3	11
7	Bagian Hukum	8	2	10
8	Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	9	2	11
9	Bagian Administrasi Pembangunan	6	4	10
10	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	6	3	9
11	Bagian Umum	29	63	92
12	Bagian Organisasi	9	3	12
13	Bagian Protokol dan Komunikasi	16	4	20
J U M L A H		**108**	**87**	**195**

Komposisi pegawai selain yang tersebut di atas dapat dilihat dari :

a. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah menurut status, pangkat dan golongan, serta sumber daya SKPD berdasarkan tingkat eselon ditunjukan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Data Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Status, Pangkat, dan GolonganSTATUS KEPEGAWAIAN	Golongan / Ruang	Sekretaris Daerah	Ass/ Staf Ahli	Sekretarias KPU Kab.Ktw.Barat	Pemerintahan & Otonomi Daerah	Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan	Hukum	Adm.Perekonomian, Infrast & SDA	Adm. Pembangunan	Layanan Pengadaan Barang & Jasa	Umum	Organisasi	Protokol & Komunikasi	**Total**
PNS														
- Pembina Utama Madya	IV/d	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
- Pembina Utama Muda	IV/c	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
- Pembina Tingkat I	IV/b	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	**7**
- Pembina	IV/a	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	**5**
- Penata Tingkat I	III/d				1	2	1	3	1	2	2	2	1	**15**

		-	-	-										
- Penata	III/c	-	-	-	1	1	4	1	4	-	4	2	3	**20**
- Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	-	3	2	1	-	-	1	6	2	2	**17**
- Penata Muda	III/a	-	-	-	2	1	1	2	-	1	5	2	3	**17**
- Pengantur Tingkat I	II/d	-	-	-	2	-	-	2	-	-	10	-	5	**19**
- Pengatur	II/c	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	**2**
- Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	1	**2**
- Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
- Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
- Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
- Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
- Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Honorer Daerah	-	-	-	-	3	3	2	2	4	3	63	3	4	**87**

b. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah, dapat disebutkan sebagai berikut :

1) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
   - Strata 3 (S-3) berjumlah : 1 Orang
   - Strata 2 (S-2) berjumlah : 18 Orang
   - Strata 1 (S-1)/ D IV berjumlah : 45 Orang
   - Diploma IIIberjumlah : 10 Orang
   - SMA/Sederajat berjumlah : 33 Orang
   - SMP Sederajat berjumlah : 1 Orang
   - SD Sederajat berjumlah : -

2) Honorer Daerah terdiri dari :
   - Strata 1 (S-1) / D IV berjumlah : 27 Orang
   - Diploma III berjumlah : -
   - SMA/Sederajat berjumlah : 51 orang
   - SMP Sederajat berjumlah : 3 Orang

- SD Sederajat berjumlah : 6 Orang

Gambaran secara lengkap tentang pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukan Tabel 2.3. pada halaman berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai menurut Status dan Tingkat Pendidikan

Tahun 2019

No	Status Kepegawaian	Sekretaris Daerah	Ass/ Staf Ahli	Sekretarias KPU Kab.Ktw.Barat	Pemerintahan & Otonomi Daerah	Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan	Hukum	Adm.Perekonomian, Infrast & SDA	Adm. Pembangunan	Layanan Pengadaan Barang & Jasa	Umum	Organisasi	Protokol & Komunikasi	Total
1	**PNS**													
	- Strata 3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Strata 2	1	2	-	2	1	1	2	1	2	1	3	2	18
	- Strata 1/D IV	-	1	1	5	2	6	3	5	2	10	4	6	45
	- Diploma III	-	-	-	1	1	1	1	-	2	2	1	1	10
	- SMA/Sederajat	-	-	-	3	4	-	2	-	-	16	1	7	33
	- SMP/Sederajat	-		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	- SD/Sederajat	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**1**	**3**	**1**	**12**	**8**	**8**	**9**	**6**	**6**	**29**	**9**	**16**	**108**
2	**Honorer Daerah**													
	- Strata 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Strata 1/D IV	-	-	-	-	3	1	1	4	1	13	2	1	26
	- Diploma III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SMA/Sederajat	-	-	-	3	-	1	1	-	2	41	1	3	52
	- SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
	- SD/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**3**	**3**	**2**	**2**	**4**	**3**	**63**	**3**	**4**	**87**

SARANA DAN PRASARANA KERJA

Dalam pelaksanaan program kegiatan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Pada tabel berikut ini digambarkan sarana dan prasarana yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi :

Tabel 2.4 Data Sarana Dan Prasarana awal Tahun 2019

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan (m2, unit, buah)	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tanah kantor Bupati	17.040	m2	3.408.000.000,-
2	Bangunan Gedung	9	unit	8.327.545.561,-
3	Alat Angkut	2	unit	311.795.000,-
	Mobil	43	unit	13.072.287.900,-
	Kendaraan Roda 2	100	unit	1.220.362.290,-
	Speed Boat	7	unit	865,000,000,-
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.691	buah/unit	13.974.741.686,-
5	Alat Studio dan Komunikasi	224	unit	1.772.921.000,-
	J U M L A H		-	42.952.653.437,-

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai staf pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya yang Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2012-2016 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya yang disajikan pada tabel T-C.23 dan T-C.24 :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2012-2016

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015
1	Nilai/peringkat Laporan Penyeleggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (menyatakan peringkat ke-n regional Prov. Kalteng)	1	1	1	1	1	peringkat ke-1 regional Prov. Kalteng	peringkat ke-1 regional Prov. Kalteng	peringkat ke-14 regional Prov. Kalteng	peringkat ke-7 regional Prov. Kalteng	peringkat ke-6 regional Prov. Kalteng	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2	Persentase tersusunnya rencana program dalam RENJA yang terakomodir	100%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	103%	115%	100%	92	100	103,00	115,00	100,00

3	Persentase tersusunnya rencana program serta laporan monitoring dan evaluasi melalui kegiatan pemantauan laporan masyarakat terhadap pelaksanaan fisik pembangunan yang tersebar di 6 kecamatan kebupaten kotawaringin barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100,00	100,00	100,00
4	Persentase pelaporan persiapan pemilu disetiap kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100,00	100,00	100,00
5	Jumlah buku Lemda yang tersusun	40	40	40	50	50	40	40	40	50	50	100	100	100,00	100,00	100,00
6	Jumlah peraturan perundangan (perda/perbup) yang disusun sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah	30	30	30	30	30	59	73	63	55	97	196,67	243,33	210,00	183,33	323,33
7	Jumlah permasalahan	6	6	6	6	6	2	2	5	2	7	33,333	33,333	83,33	33,33	116,67

	hukum aparatur dan Pemkab yang terselesaikan															
8	Jumlah terbukanya berita bersandi yang diterima pemkab	3	3	3	3	3	7	1	0	2	2	233,33	33,333	0,00	66,67	66,67
9	Jumlah sarana prasarana olahraga di lokasi Sport Center yang terbangun	100%	100%	100%	100%	100%	99,19%	96,32%	93,33%	98,80%	99,35%	99,19	96,32	93,33	98,80	99,35
10	Jumlah berita acara kesepakatan tata batas administrasi yang tercapai	10	10	10	10	10	1	0	3	7	12	10	0	30,00	70,00	120,00
11	Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3	3	3	3	3	6	8	6	7	7	200	266,67	200,00	233,33	233,33
12	Jumlah sertifikasi tanah aset pemerintah daerah	0	0	0	0	60	0	0	26	11	16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	26,67
13	Jumlah data base/inventarisir data barang milik daerah	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	100	100	100,00	100,00	100,00
14	Persentase jumlah sarana dan prasarana TPU milik Pemkab Ktw. Barat di	100%	100%	100%	100%	100%	97,77%	99,26%	95,77%	98,80%	96,34%	97,77	99,26	95,77	98,80	96,34

	wilayah kota Pangkalan Bun yang terpelihara.															
15	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	100%	100%	100%	100%	100%	240%	184%	78%	82%	74%	240	184	78,00	82,00	74,00
16	persentase sumber daya aparatur, perangkat desa, TPK dan tenaga pendamping/pendamping lokal desa yang membidangi pengadaan barang/jasa pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	86%	88%	84%	100	0	86,00	88,00	84,00
17	Persentase pegawai yang menyampaikan LHKPN (wajib lapor LHKPN) pengelola kegiatan diatas Rp. 1M)	100%	100%	100%	100%	100%	65,41%	73,77%	58,30%	57,66%	70,00%	65,41	73,77	58,30	57,66	70,00
18	Persentase jumlah LKIP SKPD yang terkumpul tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%	88,88%	75,00%	72,22%	69,44%	83,33	88,88	75,00	72,22	69,44
19	Jumlah lampu PJU yang terpelihara						179	1712	929	1089	987	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#####

20	Jumlah pengadaan, pemasangan/peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan di Kab. Kobar	100%	100%	100%	100%	100%	94,65%	88,51%	98,93%	93,87%	98,90%	94,65	88,51	98,93	93,87	98,90
21	Persentase jumlah perusahaan yang memperoleh ijin pengambilan, pemanfaatan air permukaan (IPPAP) dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	47,62%	58,33%	65,55%	0	0	47,62	58,33	65,55
22	Persentase jumlah pembinaan dan pengawasan pengendalian pendistribusian BBM di 6 Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	80,73%	7,45%	88,89%	0	0	80,73	7,45	88,89

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	300.302.000	350.780.000	2.666.826.600	65.115.400	-	227.096.500	287.407.000	2.275.992.408	54.200.000	-	75,62	81,93	85,34	83,24	#DIV/0!	(60.060.400)	(45.419.300)
Program pengelolaan areal pemakaman	51.000.000	173.575.000	955.738.450	202.048.000	938.774.000	50.175.000	169.705.000	648.692.400	193.502.000	927.464.000	98,38	97,77	67,87	95,77	98,80	928.574.000	917.429.000
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	34.807.000	34.448.296	161.354.000	311.370.000	-	20.866.500	21.233.296	111.754.200	246.397.200	-	59,95	61,64	69,26	79,13	#DIV/0!	(6.961.400)	(4.173.300)
Program perencanaan pembangunan daerah	83.408.880	193.159.320	154.207.500	775.819.000	639.076.200	73.252.230	169.472.635	122.210.400	636.900.700	502.850.250	87,82	87,74	79,25	82,09	78,68	622.394.424	488.199.804

Prog. Penataan Penguasaan,Pemilikan ,Penggunaan & Pemanfaatan tanah	361.000.000	656.624.000	4.221.690.000	2.899.817.532	533.675.000	348.928.000	2.984.000	3.748.197.500	95.960.007	156.901.280	96,66	0,45	88,78	3,31	29,40	461.475.000	87.115.680
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	103.045.000	149.384.975	-	-	-	92.351.115	141.055.475	-	-	-	89,62	94,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(20.609.000)	(18.470.223)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	962.755.000	590.400.000	481.009.450	298.064.000	328.534.000	945.304.400	573.789.675	463.300.050	278.183.000	324.599.000	98,19	97,19	96,32	93,33	98,80	135.983.000	135.538.120
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.779.821.120	5.074.337.853	7.644.640.267	8.636.819.868	10.141.916.800	4.860.670.355	4.714.887.185	6.928.034.446	7.565.669.221	9.176.020.162		92,92	90,63	94,09	90,48	8.985.952.576	8.203.886.091
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.602.671.900	1.773.488.650	11.554.026.140	4.794.398.700	6.828.320.100	2.162.465.821	1.461.727.925	9.374.291.554	4.511.280.856	6.420.193.956	83,09	82,42	81,13	#REF!	94,02	6.307.785.720	5.987.700.792
Program peningkatan disiplin aparatur	159.900.000	196.000.000	302.000.000	316.375.000	317.500.000	95.824.950	193.771.200	287.428.500	315.096.000	278.968.000	59,93	98,86	95,18	99,60	87,86	285.520.000	259.803.010
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	77.400.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	-	18.788.200	12.883.700	-	0,00	0,00	75,15	51,53	#DIV/0!	(15.480.000)	-

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	260.000.000	135.000.000	320.300.000	501.444.000	410.850.000	235.364.700	129.750.000	308.418.465	331.757.877	269.360.757	90,52	96,11	96,29	66,16	65,56	358.850.000	222.287.817
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	3.000.000	1.732.500	1.760.000	2.515.000	2.614.000	1.360.000	1.377.500	1.712.000	2.452.000	2.614.000	45,33	79,51	97,27	97,50	100,00	2.014.000	2.342.000
Prog. peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1.168.928.500	716.369.196	1.922.200.000	1.644.945.600	1.481.128.000	737.686.409	677.520.393	1.272.629.378	1.242.444.665	917.511.759	63,11	94,58	66,21	75,53	61,95	1.247.342.300	769.974.477
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	761.800.350	389.520.000	384.570.000	575.896.000	-	392.742.434	189.124.000	196.516.250	259.956.390	#DIV/0!	51,55	48,55	51,10	45,14	575.896.000	259.956.390
Prog. Peningkatan Sist.Pengawasan Intern & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	141.500.000	149.993.768	367.390.708	258.821.000	412.903.000	130.870.000	128.696.623	241.554.869	232.574.870	288.414.120	92,49	85,80	65,75	89,86	69,85	384.603.000	262.240.120

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	147.200.000	110.801.637	467.776.385	554.435.000	535.225.000	130.870.000	104.800.483	191.330.375	447.107.800	433.894.228		94,58	40,90		81,07	505.785.000	407.720.228
Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum	52.800.000	67.619.342	524.559.000	229.559.000	260.566.400	52.550.000	56.336.550	135.793.000	186.949.130	152.413.726	99,53	83,31	25,89	81,44	58,49	250.006.400	141.903.726
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	160.960.600	137.500.113	359.317.890	295.050.000	211.500.000	139.938.312	121.494.088	298.372.890	279.604.600	165.538.900	86,94	88,36	83,04	94,77	78,27	179.307.880	137.551.238
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	156.000.000	202.455.000	378.702.500	207.667.500	140.300.500	143.789.512	134.940.032	359.151.656	166.344.375	111.996.990	92,17	66,65	94,84	80,10	79,83	109.100.500	83.239.088
Program kerjasama informsi dan media massa	943.000.000	739.250.000	1.704.965.000	2.933.290.000	2.878.290.000	881.811.750	735.750.750	1.668.694.500	2.536.231.000	2.539.110.000	93,51	99,53	97,87	86,46	88,22	2.689.690.000	2.362.747.650
Prog. Pengawasan & Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	50.000.000	220.000.000	216.000.000	132.500.000	116.400.000	42.880.000	147.697.500	169.681.400	109.534.815	44.184.064	85,76	67,14	78,56	82,67	37,96	106.400.000	35.608.064

Program Pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	-	1.085.500.000	5.820.400.000	3.537.790.400	3.743.981.700	-	1.023.245.545	5.128.607.200	3.479.686.351	3.518.109.950	#DIV/0!	94,26	88,11	98,36	93,97	3.743.981.700	3.518.109.950
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	840.000.000	-	-	-	-	829.938.350	-	-	-	-	98,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(168.000.000)	(165.987.670)
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	25.600.000	-	-	20.536.850.000	13.850.000	15.800.000	-	-	1.900.193.000	12.425.000	61,72	#DIV/0!	#DIV/0!	9,25	89,71	8.730.000	9.265.000
Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia	-	-	30.000.160	4.807.000	-	-	-	4.126.000	4.120.000		#DIV/0!	#DIV/0!	13,75	85,71	#DIV/0!	-	-
Program Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan nilai-nilai keagamaan	-	-	620.879.950	1.713.790.000	153.400.000	-	-	408.367.794	1.586.297.360	146.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	65,77	92,56	95,44	153.400.000	146.400.000

Program pengembangan data/informasi	-	-	-	252.100.000	147.134.800	-	-	-	213.733.000	138.345.970	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	84,78	94,03	147.134.800	138.345.970
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	-	-	-	660.287.000	497.985.000	-	-	-	581.599.800	396.694.392	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	88,08	79,66	497.985.000	396.694.392
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	-	-	-	115.000.000	-	-	-	-	106.000.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	92,17	#DIV/0!	-	-
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	-	-	43.850.000	82.187.500	-	-	-	11.925.000	29.882.500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	27,19	36,36	82.187.500	29.882.500
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	18.002.500		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	90,01	#DIV/0!	-	-
Program Pendidikan Politik Masyarakat	-	-	-	32.735.000	17.975.000	-	-	-	30.030.000	2.250.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	91,74	12,52	17.975.000	2.250.000
Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian /Perkebunan	-	-	-	113.320.000	-	-	-	-	90.857.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	80,18	#DIV/0!	-	-

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamnan Perdagangan	-	-	-	169.975.000	527.473.000	-	-	-	159.450.000	39.317.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93,81	7,45	527.473.000	39.317.000
Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan	-	-	-	54.225.000	-	-	-	-	26.265.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	48,44	#DIV/0!	-	-
TOTAL	**14.465.100.000**	**13.545.220.000**	**41.290.264.000**	**52.724.354.000**	**31.937.456.000**	**12.219.793.904**	**11.390.385.289**	**34.356.253.185**	**27.849.749.077**	**27.255.416.394**	**84,48**	**84,09**	**83,21**	**52,82**	**85,34**	**29.044.436.000**	**24.811.457.613**

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017-2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	100%	B	CC	90.96%	A	A	A	A
2	Meningkatnya informasi dan kualitas layanan pengadaan secara elektronik	Capaian Standar Pelayanan pengelolaan LPSE	136%	71%	71%	100%	82%	90%	100%	100%
3	Meningkatnya kapasitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Capaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Ktw. Barat yang dapat diakses oleh masyarakat	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan dokumentasi dan informasi hukum	100%	C	C	100%	B	B	B	B
5	Terpublikasikan dan terdokumentasikan nya kegiatan Pemerintah Daerah dengan baik	Persentase tersebarnya informasi kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat	100%	80%	100%	125%	80%	85%	90%	95%
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kabupaten	Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD	115%	65	82.74	127%	70	75	77	80

7	Terselenggaranya pemerintahan desa yang baik	Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik	146%	70%	71.88%	103%	80%	85%	90%	90%
8	Meningkatnya Pengendalian perekonomian dan SDA	Persentase hasil monev bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti	100%	76.19%	80%	105%	76.19 %	80.95 %	80.95 %	85.71 %
9	Meningkatnya pelayanan di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan	100%	40%	80%	200%	90%	90%	90%	90%
Rata-rata						**116.74 %**				

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam konsep *New Public Management (NPM)* pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip yang utama dalam pelayanan masyarakat. Birokrasi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat idealnya dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil, dibandingkan dengan sekedar kontrol terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ada. Dari hasil telaahan terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat dan hasil analisis terhadap pembelanjaan anggaran, dapat berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun. Peluang dan tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul, sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, peluang dan tantangan tersebut antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

1. Belum maksimalnya sistem akuntabilitas kinerja bagi aparatur

   Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas yang berjalan dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dirasa masih belum maksimal. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifiktas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu merencanakan pembangunan pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan reformasi birokrasi seperti halnya menyusun sebuah *Standard Operational Procedure* (SOP) dan Pola Pengembangan Karir yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

2. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan Profesionalitas

   Ketersediaan SDM yang mumpuni dan berkualitas sesuai dengan bidang akan menghasilkan rumusan kebijakan Bupati yang berkualitas sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing bagian yang ada. Demikian juga halnya dengan pendidikan, pengetahuan, keterampilan serta mutu SDM yang baik akan menghasilkan layanan yang baik dan berkualitas kepada instansi pemerintah, pimpinan daerah maupun masyarakat.

3. Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

   Masih banyak aparatur pemerintah yang belum menyadari akan tuntutan reformasi birokrasi saat ini. Masyarakat telah menuntut keterbukaan informasi dalam pelayanan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifiktas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu merencakanan pembangunan pelayanan yang disertai reformasi birokrasi seperti halnya menyusun sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pola Pengembangan Karir yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing dan pembinaan pegawai dalam rangka reformasi birokrasi.

4. Belum adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra Sekretariat Daerah, RKA & RAPBD.

5. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan cepat.

2.4.2 Peluang Pengembangan SKPD

1. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja

   Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Untuk menunjang hal tersebut pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan penetapan indikator kinerja dan capaian analisis kinerja.

2. Adanya Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan KPK pada Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi

   Komitmen bersama atau MoU antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan KPK adalah bagian dari upaya KPK mencegah tindakan korupsi di instansi pemerintah daerah. Dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya untuk mendukung melalui optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, serta menjamin kemandirian Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

3. Banyak Peraturan Daerah yang diterbitkan

   Melalui Perda yang diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berusaha menciptakan keteraturan hukum yang sesuai dengan kearifan lokal daerahnya. Disamping itu pembuatan Perda diharapkan mampu menciptakan keefektifan kinerja pelayanan pemerintah daerah.

4. Amanat Undang-undang tentang pengelolaan *e-government* kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

   Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan dengan tujuan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan dan program pemerintah.

BAB III
PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Tahun 2018 dalam kategori CC = Cukup (memadai)
2. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah
4. Belum efektifnya tatakelola pemerintahan umum dan desa
5. Masih lemahnya peran pemerintah dalam penguatan ideologi bangsa dan penguatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama.
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang memenuhi standar pelayanan publik
2. Belum optimalnya pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sehingga tingkat kematangan yang dicapai masih rendah
3. Belum Optimalnya perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan ekonomi daerah dan potensi daerah, perekonomian dan sumber daya alam (data bidang penyaluran pendistribusian Bahan Bakar Minyak, data penggunaan sumberdaya alam yang tidak disampaikan oleh perusahaan maupun masyarakat);

4. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan bidang pengembangan ekonomi daerah dan potensi daerah, perekonomian dan sumber daya alam sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam
6. Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah yang belum optimal

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur
2. Masih perlunya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat CC = Cukup (memadai)	Hasil Evaluasi AKIP pada tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB			Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Tahun 2018 dalam kategori Cukup (memadai)
Sumber daya Manusia	Belum maksimalnya pemerataan pendidikan	Program pendidikan	Koordinasi pelayanan pendidikan		Masih perlunya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu

					sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Kelembagaan	Belum optimal	Efektivitas kinerja lembaga	Kelembagaan yang dinamis	Kebijakan Pemerintah Pusat yang dinamis	Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah
Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan kurang maksimal	5 tingkat kematangan Indonesian Procurement Maturity Model	Komitmen pengelola UKPBJ dan upaya pemenuhan variabel untuk mencapai level yang dituju	Belum ada SDM yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa; Asesmen tingkat maturity dan peta jalan pengembang an ULP	Belum optimalnya pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sehingga tingkat kematangan yang dicapai masih rendah

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH TERPILIH

3.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah:

"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"

Visi ini berorientasi pada kata IKHLAS yaitu :

I : Iptek dan Infrastruktur
K : Ketakwaan
H : Harmonis
L : Langgeng
A : Aman
S : Sejahtera

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI, yaitu :

N : Nasionalis
U : Unggul
R : Religius
A : Amanah
N : Nyata
I : Inspiratif

Untuk mewujudkan visi tersebut ada 6 (enam) misi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 2017-2022, misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industry serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energy dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

Gambar 3.1 Enam Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Dari visi dan misi tersebut, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Misi I "Memperkuat Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan"

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 1 yakni Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Transparan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan sasaran pembangunan:
   1) Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan.
   2) Meningkatnya system Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.
   3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

4) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Misi 2 "Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga"

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 2 maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan Sasaran Pembangunan:
   1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
   2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
   3) Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.

Misi 3" Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup "

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan, dengan Sasaran Pembangunan:
   1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan
   2) Meningkatnya pengembangan potensi daerah
   3) Meningkatnya pemerataan aksesbilitas daerah terkait infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi
   4) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tanggap bencana

Misi 4 " Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat "

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 4 maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis dengan penanaman nilai-nilai keagamaan, dengan Sasaran Pembangunan:
   1) Meningkatnya toleransi kerukunan antarumat beragama
   2) Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa

3) Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak.

Misi 5 " Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis "

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 5 maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan dengan sasaran pembangunan:
   1) Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis
   2) Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi
   3) Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

Misi 6 "Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata"

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 6 maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Peningkatan Pariwisata Daerah dengan Sasaran Pembangunan:
   1) Meningkatnya nilai kearifan lokal produk dan destinasi wisata
   2) Meningkatnya citra dan layanan kepariwisataan.

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

3.3.1 Telaah Renstra Sekretariat Negara 2014-2018

Untuk mendukung sinkronisasi dokumen dengan lembaga yang memiliki skala lebih besar, maka dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Sekretariat Negara Periode 2014-2018. Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwasannya arah kebijakan pada kementerian sekretariat Negara adalah:

1. Meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, mencakup peningkatan:
   a. Kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
   b. Kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan WakilPresiden
   c. Kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan analisis perundang-undangan;

d. Kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;
e. Kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat pemerintahan, TNI, dan POLRI;

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat Negara tertentu
3. Meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan perundang-undangan, mencakup peningkatan:
   a. Kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan analisis perundang-undangan
   b. Hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan
   c. Kualitas penanganan pengaduan masyarakat
4. Meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur

3.3.2 Telaah Renstra Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Telaah pada Renstra Provinsi dilakukan untuk mengakomodir berbagai agenda pembangunan yang memerlukan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu untuk melihat beberapa hal yang mungkin akan menghambat pembangunan di kabupaten atau kota yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat daerah. Berdasarkan hasil telaah bahwasannya tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum, pelayanan, informasi dan komunikasi kepada masyarakat;
3. Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur;
4. Peningkatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam peneyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis kinerja;
5. Meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bidang pembangunan, pemberdayaan ekonomi, keagamaan, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan;
6. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
2. Meningkatnya Kapasitas Perpustakaan Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Meningkatnya Motivasi sumber daya aparatur;
8. Meningkatnya Penyelesaian produk hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Meningkatnya pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
10. Meningkatnya pola pengembangan potensi ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan kerjasama luar negeri bidang ekonomi;
11. Meningkatnya Perluasan Pangsa Pasar Industri dan Pariwisata;
12. Meningkatnya Pengendalian terhadap Penggunaan Anggaran;
13. Meningkatnya tertib pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Tata Ruang;
14. Meningkatnya koordinasi pelayanan kehidupan beragama;
15. Terwujudnya tapal batas Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Meningkatnya pembinaan dan penataan daerah otonomi dalam Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penyelenggraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dengan konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang. Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah

lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan dalam kebijakan, rencana dan program.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Berdasarkan hasil analisis RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017–2022 disandingkan dengan KLHS menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) isu, antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan rendahnya SDM
2. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan rata-rata masih rendah
3. Sarana prasarana permukiman belum memenuhi kebutuhan penduduk;
4. Kerusakan lingkungan dan hutan meningkat
5. Penegakan hukum masih lemah
6. Pengelolaan SDA belum optimal
7. Pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwista belum optimal.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai fasilitator dan koordinator dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, berupaya melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka membantu

Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat maka dapat diuraikan berbagai isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 yang masih mendapatkan nilai CC;
2. Belum optimalnya peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat;
3. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah;
4. Belum efektifnya tatakelola pemerintahan umum dan desa;
5. Masih lemahnya peran pemerintah dalam penguatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama;
6. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang memenuhi standar pelayanan publik
7. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
8. Belum optimalnya pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sehingga tingkat kematangan yang dicapai masih rendah
9. Belum Optimalnya perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan ekonomi daerah dan potensi daerah, perekonomian dan sumber daya alam (data bidang penyaluran pendistribusian Bahan Bakar Minyak, data penggunaan sumberdaya alam yang tidak disampaikan oleh perusahaan maupun masyarakat);
10. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan bidang pengembangan ekonomi daerah dan potensi daerah, perekonomian dan sumber daya alam sesuai kewenangan yang dimiliki
11. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam
12. Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah yang belum optimal
13. Sarana prasarana dan tata ruang kerja yang kurang representatif;
14. Belum meratanya kesempatan pendidikan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

4.1 TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Formulasi tujuan strategis ini bertujuan agar Sekretariat Daerah dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misi Bupati untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Sekretariat Daerah untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati yang telah dicapai. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilannya didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun tujuan strategis dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah mengalami *review* dan perubahan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Pengendalian Inflasi Daerah
3. Mewujudkan kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan

4.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur

dalam waktu tahunan maka Sekretariat Daerah menjabarkannya dalam 10 (sepuluh) sasaran yang telah dilakukan *review* dan perubahan mencakup :

Tujuan 1 Meningkatkan Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Tercapainya penyelesaian konflik pertanahan
4. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran
5. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah
6. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah
8. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Tujuan 2 Meningkatkan Pengendalian Inflasi Daerah, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam

Tujuan 3 Mewujudkan kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah mengalami *review* dan perubahan, dapat dilihat pada tabel T-C.25.

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Kualitas Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	90%	91%	92%	95%	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai 80	Nilai 80	Nilai 82	Nilai 84	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai 2,9	Nilai 2,9	Nilai 3	Nilai 3,05	
		Tercapainya penyelesaian konflik pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	75%	75%	80%	80%	
		Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	85%	85%	88,8 %	92%	

		Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	
		Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	75%	75%	80%	85%	
		Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Nilai 85	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 95	
		Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	93%	93%	94,2 %	95,6 %	
2	Meningkatkan Pengendalian Inflasi Daerah		Penurunan Inflasi Daerah	1,26 %	1,26 %	1,26 %	1,26 %	
		Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	75%	75%	76%	76%	

			Persentase Desa dan Kelurahan yang telah terfasilitasi Penerangan Jalan Umumnya	64,9%	67%	68%	69%	
3	Mewujudkan kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan		Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai 70	Nilai 70	Nilai 75	Nilai 80	
		Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai 70	Nilai 70	Nilai 75	Nilai 80	

Pemahaman terkait linieritas Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah dengan Sasaran RPJMD dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut :

1. SASARAN RPJMD : Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Aparatur dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Tujuan	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah							
Indikator Tujuan	Kualitas Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah							
Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tercapainya penyelesaian konflik pertanahan	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah
Indikator Sasaran	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah

Program	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Pembinaan dan pengembangan organisasi	Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Program penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi publik
Indikator Program	Kualitas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	(1) Persentase PD Pelayanan Publik yang nilai IKMnya sesuai dengan target IKU Daerah; (2) Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi	(1). Persentase kesesuaian skor IKK dengan data pendukung yang disampaikan SKPD; (2) Persentase Kepala Desa yang menyampaikan LPPDes kepada Kepala Daerah; (3) Persentase usulan terbentuknya daerah pemekaran baru yang ditindaklanjuti; (4) Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar Kabupaten; (5) Persentase Penawaran Kerjasama Pemerintah Daerah yang disepakati	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	(1) Persentase Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan Perencanaan Anggaran SKPD; (2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah; (3) Persentase Data Dukungan Kebijakan Nasional yang dapat terpenuhi; (4) Persentase capaian realisasi APBD yang sesuai dengan target	Persentase kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	(1) Persentase Produk Hukum Daerah yang mendapatkan fasilitasi/ evaluasi Pemerintah Provinsi; (2) Persentase produk hukum daerah yang tersosialisasi dan terpublikasi; (3) Persentase permasalahan hukum daerah yang dapat ditindaklanjuti; (4) Kualitas Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kegiatan pimpinan daerah, kunjungan tamu daerah serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang terpublikasi dan terdokumentasi

Kegiatan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	(1) Penyusunan, Penataan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah; (2) Peningkatan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	(1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); (2) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa; (3) Penyiapan data dan informasi pembentukan, penataan dan pengembangan wilayah; (4) Penyelesaian Masalah Perbatasan antar daerah; (5) Kerjasama antar Daerah/ Pihak Ketiga	(1) Penyiapan Data dan Identifikasi Awal Lahan gambut; (2) Penyelesaian konflik pertanahan	(1) Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); (2) Penyusunan Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perangkat daerah; (3) Peningkatan Manajemen bidang Administrasi Pembangunan; (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	(1) Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa; (2) Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa (3) Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	(1) Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah; (2) Publikasi Peraturan Perundang-undangan; (3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; (4) Pemberian Bantuan Hukum; (5) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Penyediaan Jasa Surat menyurat, dan kegiatan kesekretariatan lainnya	Pembangunan Rumah Jabata, dan kegiatan kesekretariatan lainnya	(1) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; (2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	(1) Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi; (2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; (3) Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	(1) Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah; (2) Peliputan dan publikasi Pemerintah Daerah; (3) Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat; (4) Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri; (5) Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah; (6) Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

2. SASARAN RPJMD : Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah

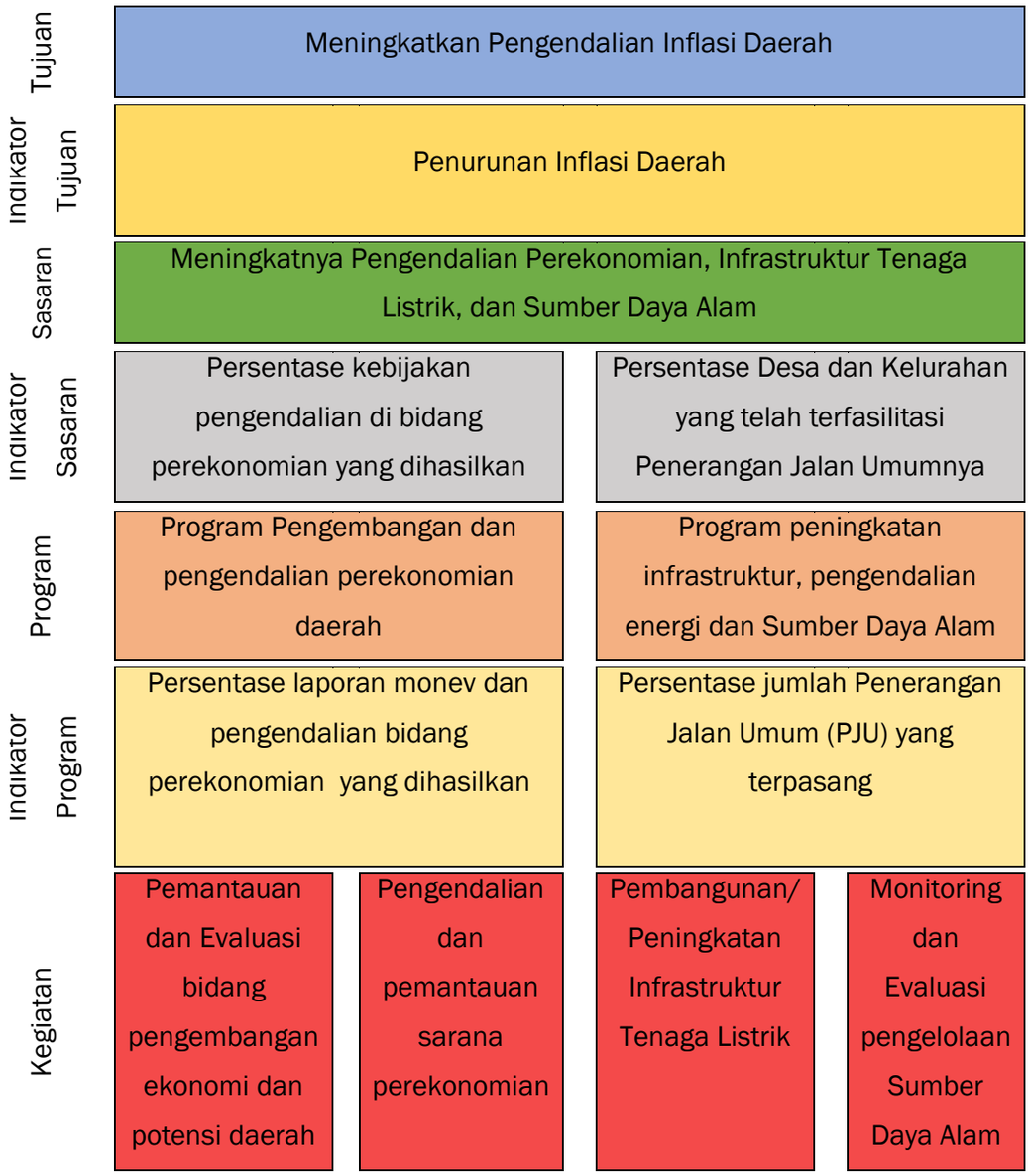

3. SASARAN RPJMD : Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)

Tujuan	Mewujudkan kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan	
Indikator Tujuan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	
Sasaran	Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	
Indikator Sasaran	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	
Program	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	
Indikator Program	Persentase pelayanan dan fasilitasi di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	
Kegiatan	Kegiatan Pelayanan, pembinaan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan,	Kegiatan Penyusunan bahan Kebijakan dan peningkatan kesadaran Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
		Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kemasyarakatan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Strategi juga menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisa SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan factor eksternal dan faktor internal yang melekat pada masing-masing isu tersebut. Identifikasi faktor eskternal dan internal disampaikan dalam tabel 5.1.

5.1 STRATEGI

Tabel 5.1 Identifikasi SWOT

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah	UU 23 Tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan e-government kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dg predikat WTP	Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja
Komitmen aparatur yang kuat terhadap peningkatan pelayanan	Adanya Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan KPK pada Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan	
(-) Kelemahan	(-) Ancaman
Jumlah dan kapasitas SDM yang kurang memadai	Terdapat beberapa urusan pemerintahan yang tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten
Belum optimalnya proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	Belum efektifnya tatakelola Pemerintahan Umum dan Desa
Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya peran pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
Masih kurangnya kualitas dan kuantitas penyebaran informasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah	
Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan yang kurang memperhatikan skala prioritas dalam pencapaian sasaran strategis	

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Sekretariat Daerah. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi seperti dalam Tabel 5.2

Tabel 5.2 Alternatif Strategi berdasarkan Analisis SWOT

EKSTERNAL INTERNAL	**Peluang (Opportunities):**	**Ancaman (Threats):**
	- UU 23 Tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan e-government kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	- Terdapat beberapa urusan pemerintahan yang tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten
	- Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja	- Belum efektifnya tatakelola Pemerintahan Umum dan Desa
	- Adanya Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan KPK pada Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi	- Belum optimalnya peran pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
Kekuatan (Strengths) :	**Alternatif Strategi :**	**Alternatif Strategi :**
- Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dg predikat WTP - Komitmen aparatur yang kuat terhadap peningkatan pelayanan - Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah	- Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas pemerintah - Mendorong peningkatan kualitas kelembagaan dan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	- Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA secara berkala - Mendorong Desa untuk dapat menyusun dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah desa - Meningkatkan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan
Kelemahan (Weakneses) :	**Alternatif Strategi :**	**Alternatif Strategi :**
- Jumlah dan kapasitas SDM yang kurang memadai	- Optimalisasi, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah agar tidak bertentangan dengan Per-UU lain dan kepentingan umum	- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan bidang perencanaan dan evaluasi kinerja
- Belum optimalnya proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum		- Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan
- Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan	- Meningkatkan publikasi dan dokumentasi kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah	

pemerintahan daerah		
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas penyebaran informasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah		
- Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan yang kurang memperhatikan skala prioritas dalam pencapaian sasaran strategis		- Efektifitas pengalokasian anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas

Berdasarkan amanat Permendagri No 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program wajib menjamin keseimbangan empat perspektif *balanced scorecard*. Keempat persepektif tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Perspektif masyarakat/ layanan (P1) adalah perspektif yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
b. Perspektif proses internal (P2) adalah perspektif bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
c. Perspektif kelembagaan (P3) yaitu perspektif yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
d. Perspektif keuangan yaitu perspektif yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Perumusan Strategi yang telah memenuhi keempat perspektif *balanced scorecard* dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Perumusan Strategi sesuai Perspektif *Balanced Scorecard*

NO	PERSPEKTIF	Alternatif Strategi	STRATEGI
a.	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan	Meningkatkan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan melalui pembinaan keagamaan dan

			kemasyarakatan
b.	Perspektif proses Internal	Optimalisasi, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah agar tidak bertentangan dengan Per-UU lain dan kepentingan umum	Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas pemerintah
		Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas pemerintah	
		Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan	
c.	Perspektif Kelembagaan	Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA secara berkala	Mengoptimalkan pengendalian terhadap perekonomian dan SDA secara berkelanjutan
		Meningkatkan publikasi dan dokumentasi kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah	Menciptakan tatakelola kelembagaan yang profesional
		Mendorong Desa untuk dapat menyusun dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah desa	
		Mendorong peningkatan kualitas kelembagaan dan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	

		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan bidang perencanaan dan evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan
d.	Perspektif Keuangan	Efektifitas pengalokasian anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas	

Berdasarkan analisa diatas, maka strategi yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

a. Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas pemerintah
b. Menciptakan tatakelola kelembagaan yang profesional
c. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan
d. Mengoptimalkan pengendalian terhadap perekonomian dan SDA secara berkelanjutan
e. Meningkatkan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan melalui pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam memenuhi tujuan, sasaran dan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kinerja Tim SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat (Bagian Organisasi Setda, Bappeda dan Inspektorat) melalui pembinaan dan pendampingan pelaksanaan SAKIP secara masif kepada Perangkat Daerah dengan pengawasan langsung Kementerian PAN dan RB
b. Pembinaan administrasi pemerintahan umum dan desa
c. Evaluasi dan *review* kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta mendorong Perangkat Daerah untuk membangun *database* capaian kinerja
d. Pembinaan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan Sekretariat Daerah
e. Efisiensi dan efektivitas pemenuhan kebutuhan penunjang Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi

f. Fasilitasi dan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah
g. Menyempurnakan regulasi kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui evaluasi kelembagaan, sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan layanan publik
h. Melakukan penataan Peraturan Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta diseminasi HAM
i. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
j. Pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan pola karir jabatan fungsional, pemetaan pengembangan SDM PPBJ serta mengadakan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa
k. Fasilitasi pembinaan keagamaan dalam rangka meningkatkan kehidupan beragama
l. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan perekonomian dan pengendalian pemanfaatan SDA

Untuk mengetahui tahun pelaksanaan masing-masing arah kebijakan dan tematik pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 5.4

Tabel 5.4 Tahun Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Tematik Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	ARAH KEBIJAKAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kinerja Tim SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat (Bagian Organisasi Setda, Bappeda dan Inspektorat) melalui pembinaan dan pendampingan pelaksanaan SAKIP secara masif kepada Perangkat						

	Daerah dengan pengawasan langsung Kementerian PAN dan RB						
2	Pembinaan administrasi pemerintahan umum dan desa						
3	Evaluasi dan *review* kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta mendorong Perangkat Daerah untuk membangun *database* capaian kinerja						
4	Pembinaan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan Sekretariat Daerah						
5	Efisiensi dan efektivitas pemenuhan kebutuhan penunjang Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi						
6	Fasilitasi dan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan						

	layanan informasi kegiatan pemerintah daerah						
7	Menyempurnakan regulasi kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui evaluasi kelembagaan, sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan layanan publik						
8	Melakukan penataan Peraturan Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta diseminasi HAM						
9	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan						
10	Pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan pola karir						

	jabatan fungsional, pemetaan pengembangan SDM PPBJ serta mengadakan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa						
11	Fasilitasi pembinaan keagamaan dalam rangka meningkatkan kehidupan beragama						
12	Melakukan pemantauan terhadap kegiatan perekonomian dan pengendalian pemanfaatan SDA						
TEMATIK PEMBANGUNAN		Penyusunan organisasi perangkat daerah	Penataan struktur organisasi perangkat daerah dalam rangka tepat fungsi	Mengoptimalkan peran sekretariat daerah dalam pengkordinasian, perumusan kebijakan pemerintah daerah	Menguatkan pengkordinasian, perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyelenaggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakatan	Menguatkan pengkordinasian, perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyelenaggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakatan	Mempersiapkan/ memantapkan peran sekretariat daerah dalam pengkordinasian, perumusan kebijakan pemerintah daerah

Dalam rangka melihat keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan melalui tabel 5.5.

Tabel 5.5 Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

VISI	**: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas**		
MISI I	: Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.		
TUJUAN OPD	**SASARAN OPD**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas pemerintah	- Meningkatkan kinerja Tim SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat (Bagian Organisasi Setda, Bappeda dan Inspektorat) melalui pembinaan dan pendampingan pelaksanaan SAKIP secara masif kepada Perangkat Daerah dengan pengawasan langsung Kementerian PAN dan RB. - Menyempurnakan regulasi kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui evaluasi kelembagaan, sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan layanan publik

	1.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		- Pembinaan administrasi pemerintahan umum dan desa - Evaluasi dan *review* kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta mendorong Perangkat Daerah untuk membangun *database* capaian kinerja
	1.3 Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	Menciptakan tatakelola kelembagaan yang profesional	Pembinaan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan Sekretariat Daerah
	1.4 Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi		Efisiensi dan efektivitas pemenuhan kebutuhan penunjang Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi
	1.5 Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah		Pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan pola karir jabatan fungsional, pemetaan pengembangan SDM PPBJ serta mengadakan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa
	1.8 Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah		Fasilitasi dan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah

	1.6 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan	Melakukan penataan Peraturan Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta diseminasi HAM
	1.7 Tercapainya penyelesaian konflik pertanahan		Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
MISI III	: Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energy dengan memperhatikan lingkungan hidup		
TUJUAN OPD	**SASARAN OPD**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
1. Meningkatkan Pengendalian Inflasi Daerah	1.1 Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam	Mengoptimalkan pengendalian terhadap perekonomian dan SDA secara berkelanjutan	Melakukan pemantauan terhadap kegiatan perekonomian dan pengendalian pemanfaatan SDA
MISI IV	: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat		
TUJUAN OPD	**SASARAN OPD**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
1. Mewujudkan kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan	1.1 Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Meningkatkan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan melalui pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan	Fasilitasi pembinaan keagamaan dalam rangka meningkatkan kehidupan beragama

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang tercantum dalam bab sebelumnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 melaksanakan 23 (dua puluh tiga) program dan 61 (enam puluh satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 27.766.914.000,-, antara lain:

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
   - Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
   - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   - Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   - Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah
   - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
   - Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
   - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
   - Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
   - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor
   - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
   - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
   - Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
   - Kegiatan Pengadaan Mobil jabatan
   - Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   - Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
   - Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
   - Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
   - Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
6. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
   - Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
7. Program Pengembangan data/ informasi
   - Kegiatan Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE)
8. Program Perencanaan pembangunan daerah
   - Kegiatan Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
   - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
   - Kegiatan Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang dan jasa (ULP)
9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
   - Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah
   - Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
   - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
10. Program Pembinaan dan pelayanan hukum
    - Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
11. Program Peningkatan kesadaran dan pemahaman Hak Asasi Manusia
    - Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
12. Program kerjasama informasi dan media massa
    - Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
    - Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
13. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH
    - Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota

organisasi sosial dan masyarakat

- Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
- Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah
- Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

14. Program Pembinaan dan pengembangan organisasi
    - Kegiatan Peningkatan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
15. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
    - Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
    - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
    - Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
17. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
    - Kegiatan Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
    - Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
18. Program pendidikan politik masyarakat
    - Monitoring dan Pelaporan Pemilu
19. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
    - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur tenaga listrik
20. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan
    - Kegiatan Pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan
21. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
    - Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
22. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
    - Kegiatan Pelayanan ibadah Haji
23. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
    - Kegiatan Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan

Pada tahun 2018 Sekretariat Daerah melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) program dan 83 (delapan puluh tiga) kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp.36.773.639.431,-, yang terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah
    - Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

- Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
   - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   - Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   - Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah
   - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
   - Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
   - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
   - Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
   - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor
   - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
   - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
   - Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan
   - Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
   - Kegiatan Pengadaan Mobil jabatan
   - Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   - Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
   - Kegiatan Pengadaan Meubelair
   - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama
   - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
   - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
   - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
   - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
   - Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
   - Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
   - Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung asrama

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
   - Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
   - Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   - Kegiatan Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi
   - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
   - Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
6. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
   - Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
7. Program Pengembangan data/ informasi bidang pengadaan
   - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
8. Program Penyusunan kebijakan dan administrasi pembangunan
   - Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan
   - Kegiatan Peningkatan Manajemen bidang Administrasi Pembangunan
   - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
9. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
   - Kegiatan Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa
   - Kegiatan Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa
   - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
    - Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah
    - Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
    - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
11. Program Pembinaan dan pelayanan hukum
    - Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
12. Program Peningkatan kesadaran dan pemahaman Hak sasi Manusia
    - Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
13. Program Penyebaran Informasi dan Dokumentasi
    - Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
    - Kegiatan Peliputan dan publikasi Pemerintah Daerah
14. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH
    - Kegiatan Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota

organisasi sosial dan masyarakat

- Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
- Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah
- Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
- Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

15. Program Pembinaan dan pengembangan organisasi
    - Kegiatan Penyusunan, Penataan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
    - Kegiatan Peningkatan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
16. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
    - Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
    - Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
    - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17. Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
    - Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
18. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
    - Kegiatan Penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
19. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
    - Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbatasan antar daerah
20. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
    - Kegiatan Kerjasama antar Daerah/ Pihak Ketiga
21. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
    - Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
22. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
    - Kegiatan Pengembangan potensi unggulan daerah
    - Kegiatan Pengembangan promosi daerah dan investasi
23. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
    - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur tenaga listrik
24. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan
    - Kegiatan Pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan
25. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
    - Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
26. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

- Kegiatan Monitoring dan Inventarisasi/Pendataan Wilayah Penambangan Rakyat

27. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
    - Kegiatan Pelayanan ibadah Haji
    - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Penghulu
    - Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana peribadatan
    - Kegiatan Pemberdayaan Tokoh Agama
28. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
    - Kegiatan Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan
29. Program Pembinaan Kemasyarakatan
    - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kemasyarakatan
    - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
    - Kegiatan peningkatan kesadaran kesehatan sekolah
    - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap lembaga kemasyarakatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019–2022 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) program dan 75 (tujuh puluh lima) kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah
    - Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
    - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
    - Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
    - Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah
    - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
    - Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
    - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
    - Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
    - Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
    - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi KDH/WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan
   - Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
   - Kegiatan Pengadaan Mobil jabatan
   - Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   - Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
   - Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
   - Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
   - Kegiatan Pengadaan Meubelair
   - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama
   - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
   - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas
   - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
   - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
   - Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
   - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
   - Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
   - Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
   - Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas
   - Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung asrama
   - Kegiatan penyediaan jasa sewa asrama mahasiswa
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
   - Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
   - Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   - Kegiatan Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

6. Program Fasilitasi pindah/ purna tugas PNS
   - Pemulangan Pegawai pensiun
7. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
   - Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
8. Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan
   - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
   - Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan
   - Kegiatan Peningkatan Manajemen bidang Administrasi Pembangunan
   - Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
9. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
   - Kegiatan Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa
   - Kegiatan Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa
   - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum
    - Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah
    - Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
    - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
    - Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
    - Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
11. Program penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi publik
    - Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
    - Kegiatan Peliputan dan publikasi Pemerintah Daerah
    - Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
    - Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
    - Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah
    - Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

12. Program Pembinaan dan pengembangan organisasi
    - Kegiatan Penyusunan, Penataan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
    - Kegiatan Peningkatan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
13. Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
    - Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
    - Kegiatan Pemilihan Kepala Desa
    - Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
    - Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pemilu
    - Kegiatan Penyiapan data dan informasi pembentukan, penataan dan pengembangan wilayah
    - Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbatasan antar daerah
    - Kegiatan Kerjasama antar Daerah/ Pihak Ketiga
14. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
    - Kegiatan Penyiapan Data dan Identifikasi Awal Lahan gambut
    - Kegiatan Penyelesaian konflik pertanahan
15. Program Pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah
    - Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah
    - Kegiatan Pengendalian dan pemantauan sarana perekonomian
16. Program peningkatan infrastruktur, pengendalian energi dan Sumber Daya Alam
    - Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Tenaga Listrik
    - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Sumber Daya Alam
17. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan
    - Kegiatan Pelayanan, pembinaan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan
    - Kegiatan Penyusunan bahan Kebijakan dan peningkatan kesadaran Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
    - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kemasyarakatan

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan secara rinci yang telah dilakukan *review* dan perubahan dapat disajikan melalui tabel *cascading* kinerja pada matriks program dan kegiatan terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 terdapat 6 misi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah secara langsung melaksanakan misi yang ke-1 (satu) dan ke-4 (empat) yaitu:

Misi 1 "Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan RPJMD tertuang dalam pohon kinerja pencapaian misi I berikut ini:

Sumber : RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Gambar 7.1 Pohon Kinerja Pencapaian Misi I Kabupaten Kotawaringin Barat

Misi 4 "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat"

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan RPJMD tertuang dalam pohon kinerja pencapaian misi 4 berikut ini :

Sumber : RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Gambar 7.2 Pohon Kinerja Pencapaian Misi IV Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari pohon kinerja di atas dapat dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel T-C.28.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP Kabupaten	C	CC	B	A	A	A	A	A
2	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	NA	NA	NA	Nilai 70	Nilai 70	Nilai 75	Nilai 80	Nilai 80

BAB VIII
PENUTUP

Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–2022 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati yang diturunkan menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017–2022.

Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017–2022 sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama seluruh komponen Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

SUYANTO, SH, MH
NIP. 19640418 199203 1 009

MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DALAM RENSTRA SKPD YANG TELAH SINKRON DENGAN RPJMD SEBELUM MENGALAMI *REVIEW*

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL RENSTRA (2016)	2017		KINERJA AKHIR RENSTRA		BIDANG OPD
												Target	Rp	Target	Rp	
1	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.	S2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	Peningkatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah					%		100				
						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten			Nilai		CC				

								Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	**Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi**	**%**		**60**	**249,959,088**	**100%**	**249,959,088**	**BAG. ORGANISASI**
								Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah dokumen LKIP RKT, PK Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersusun	Dokumen		3	249,959,088		249,959,088	
				Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks kepuasan aparatur											

						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran			**%**		**97**				
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**%**		**97**	**11,268,577,400**		**76,620,060,053**	**BAG. UMUM**
								Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat/ paket yang tersampaikan	Pucuk surat/ kg paket		840 Pucuk, 75 kg paket	5,300,000	3680 pucuk, 350 paket	40,900,000	
								Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	bulan		12	4,172,630,000	72	27,829,130,000	

								Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tahun		1	370,562,500	6	2,094,925,000	
								Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Orang		7	162,000,000	123	1,119,500,000	
								Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	Jumlah gedung/ barang milik daerah yang diasuransikan	Gedung		4	270,550,000	24	860,550,000	
								Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa	unit		96	67,950,000	581	413,525,000	

								perizinan kendaraan dinas operasional	pemeliharaan dan perizinan							
								Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Bulan		12	1,657,543,800	72	15,898,357,400	
								Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan		12	516,477,800	72	5,371,572,800	
								Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	unit/ tahun		159	137,032,000	953	1,001,582,000	
								Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	jenis ATK		45	175,875,000	270	1,129,982,500	
								Kegiatan Penyediaan barang	Jumlah persediaan barang	Jenis		20	180,600,000	110	1,147,345,000	

								cetakan dan pengganda an	cetakan							
									Jumlah Pengganda an	Lembar		326. 000		2516 30		
								Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ peneranga n bangunan kantor	Jumlah Komponen dan instalasi listrik yang disediakan	Jenis/ kompone n		32	63,970,50 0	195	435,541,5 60	
								Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	jenis		48	429,825,0 00	288	2,379,175 ,000	
								Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	paket		1	26,250,00 0	6	747,910,0 00	

								Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan minuman, rapat, dan tamu kerja yang disediakan	bulan		12	1,570,238,500	72	7,739,738,500	
								Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tahun		1	1,461,772,300	1	8,410,325,293	
						Meningkatkan tatakelola organisasiyang akuntabel dan profesional	Persentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur			**%**		**90**				
								Program Peningkatan Sarana	**Cakupan layanan sarana dan**	**%**		**90**	**6,631,189,200**		**63,227,103,800**	**BAG. UMUM**

								dan Prasarana Aparatur	**prasarana aparatur**							
								Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit		2	532,500,000	7	**27,268,069,600**	
								Kegiatan Pengadaan Mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	unit		2	1,694,877,500	4	2,904,877,500	
								Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	unit		5	595,672,500	11	1,795,672,500	
								Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah gedung/kantor yang diadakan	jenis		13	746,707,070	63	2,297,907,070	
								Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah rumah jabatan	unit		2	231,000,000	12	1,133,750,000	

								rutin/berkala rumah jabatan	yang dipelihara rutin/ berkala							
								Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	4		4	399,452,000	24	2,228,297,000	
								Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/ berkala	unit		4	154,800,000	24	2,051,200,000	
								Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/ berkala	unit		89	804,807,200	534	2,671,307,200	
								Kegiatan Pemelihara	Jumlah Peralatan	unit		100	52,680,00	400	346,300,0	

								an Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala				0		00	
								Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab	unit		2	200,000,000	6	953,000,000	
								Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	unit		3	918,692,930	20	2,854,942,930	
								Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	unit		1	300,000,000		650,000,000	
								Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan**	**%**		**100**	**8,000,000**		**182,000,000**	**BAG. UMUM**

								capaian kinerja dan keuangan	**keuangan**							
								Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Dok		2	3,000,000	12	22,000,000	
								Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dok		2	5,000,000	12	160,000,000	
								Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Tingkat Kepatuhan Aparatur**	**%**		**90**	**274,500,000**		**1,970,750,000**	**BAG. UMUM**
								Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stell		219	147,950,000	1314	936,950,000	

								Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	stell		227	126,550,000	1362	1,033,800,000	
								Prog. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	**Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**%**		**21**	**346,500,000**		**2,042,500,000**	**BAG. ORGANISASI**
								Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dan pelatihan	OK		38	346,500,000	244	2,042,500,000	

		S.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan E-Gov	Meningkatkan tata kelola pelayanan yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Capaian Standar Pelayanan pengelolaan LPSE					%		52				
						Meningkatnya informasi dan kualitas layanan pengadaan secara elektronik	Capaian Standar Pelayanan pengelolaan LPSE			%		52				
								Program Pengembangan data/ informasi	**Jumlah sistem informasi bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang yang**	**Sistem Informasi**		**1**	**139,950,000**	**1**	**139,950,000**	**BAG. ADM. PEMBANGUNAN**

									diterapkan dalam mendukung E-gov							
								Kegiatan Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE)	- Jumlah data perusahaan yang diverifikasi / mendapatkan fasilitasi agregasi & laporan pengaduan permasalahan LPSE serta data SKPD/ PPK/ Panitia/ Pejabat Pengadaan yang memperoleh akun dalam SPSE	Data	36	36	139,950,000	36	139,950,000	

									- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LPSE	Orang		100		100		
									- Jumlah peserta asistensi SiRUP	SKPD		38		38		
						Meningkatnya kapasitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Capaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	**Prog. Perencanaan pembangunan daerah**		**%**		**100**	**962,725,000**		**51,625,000**	**BAG. PEMERINTAHAN**
								Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	jumlah dok LPPD yang dihasilkan	Dok		1	51,625,000	1	51,625,000	

								Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan dan dokumentasi Monev Program/ kegiatan pembangunan	Dok	0	6	79,050,000	**6**	**79,050,000**	**BAG. ADM PEMBANGUNAN**
									Jumlah laporan monev online & monev SiRUP	Dok		24		**24**		
									Website bag. Adm. Pembangunan yang dikelola	web		1		**1**		
								Keg. Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang dan jasa (ULP)	Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa	Orang		150	832,050,000	150	**4,693,790,000**	**BAG LAYANAN PENGADAAN B/J**

									Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa desa	Orang		200		200		
									Tingkat kematangan organisasi pengadaan	level		3		20		
						Meningkatnya dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Ktw. Barat yang dapat diakses oleh masyarakat	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan dokumentasi dan informasi hukum			**Nilai/ Skor**		**C**				
								Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	**Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat**	**%**		**100**	**715,100,000**	**100%**	**1,189,013,800**	**BAG. HUKUM**

								Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah	Jumlah Perda ditetapkan	Perda		10	406,600,000	20	**Rp 584,300,000**	
									jumlah peraturan Bupati dan keputusan Bupati ditetapkan	Perbup/ SK		60		120		
								Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lembaran Daerah dan Berita Daerah diterbitkan	Dok		60	43,500,000	120	**102,738,800**	
									Jumlah Himpunan Perda yang disebarlua	buku		120		240		

									skan							
									Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses masyarakat	Dok		210		420		
								Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Desa/ kelurahan tersosialisasi	Desa		10	265,000,000	20	**501,975,000**	
									Jumlah Kelompok Kadarkum dan Desa Binaan Sadar Hukum	Kelompok dan Desa		10		20		
								Program Pembinaan dan pelayanan hukum	**Persentase permasalahan hukum tertangani**	**%**		**100**	**1,129,700,000**	**100**	**1,517,400,000**	**BAG. HUKUM**
								Kegiatan Pemberian	Jumlah Rapat-	Kali		12	1,129,700	24	1,517,400	

								Bantuan Hukum	Rapat Permasalahan Hukum oleh Tim Khusus				,000		,000	
									Jumlah Dokumen Adminsitrasi Beracara di Pengadilan	Dokumen		2		4		
									Jumlah Jasa Advokasi/ Pengacara	Paket		1		2		
									Jumlah bantuan hukum kepada Aparatur dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Permasalahan hukum		5		12		

								Prog Peningkatan kesadaran dan pemahaman Hak sasi Manusia	**Angka pelanggaran HAM**				**74,400,000**		**142,800,000**	**BAG. HUKUM**
								Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi / Sosialisasi Hak Asasi Manusia	kali		2	74,400,000	4	142,800,000	
									Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Panitia RANHAM dan Pokja	kali		6		12		
							Terpublikasikan dan terdokumentasikannya kegiatan Pemerintah	Persentase tersebarnya informasi kegiatan			%	-	**80**				

						Daerah dengan baik	Pemerintah Daerah kepada masyarakat									
								Program kerjasama informasi dan media massa	**Persentase peningkatan publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah**	**%**		**100**	**1,670,132,400**	**95%**	**1,670,132,400**	**BAG. PROTOKOL & KOMUNIKASI**
								Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah dokumentasi dan media publikasi kegiatan Pemkab. Kotawaringin Barat	jenis		12	676,932,400	12	676,932,400	
									Jumlah kegiatan pameran photo yang terselenggara	keg		1		1		

								Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah peliputan kegiatan pemerintah daerah yang terselenggara	kali		20	993,200,000	20	993,200,000	
									Jumlah penyebaran informasi yang terselenggara melalui media cetak, elektronik dan online	media		8				
								Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH	**Persentase pelayanan kedinasan KDH/ WKDH yang terlaksana baik**	**%**		**90**	**1,928,010,000**		**3,923,597,240**	**UMUM/ PROKOM**

								Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Tahun		1	671,010,000	2	**1,345,447,240**	
									Jumlah kegiatan rapat Forkopimda yang diselenggarakan	kali		15		30		
								Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah	kali		30	347,300,000	60	**831,450,000**	

								pemerintah non departemen/ luar negeri	non departemen/ luar negeri yang diterima							
								Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	kali		80	309,700,000	160	**476,700,000**	
								Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti oleh KDH/ WKDH	OK		20	600,000,000	40	**1,270,000,000**	
			Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi	Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD					**Nilai/ Skor**		**65**				

			kualitas layanan publik	perangkat daerah											
						Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kabupaten	Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD			**Nilai/ Skor**		**65**			
								Program Pembinaan dan pengembangan organisasi	**Persentase SKPD yang memiliki SOP bidang administrasi dan pemerintahan**	**%**		**100**	**150,040,912**	**100%**	**1,985,322,912**	**BAG. ORGANISASI**
								Kegiatan Peningkatan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah profil kelembagaan yang dihasilkan	Dokumen		1	150,040,912	**6**	**1,335,322,912**	

									Jumlah dokumen SPM yang dibuat	Dokumen		3		**18**		
									Jumlah Perda dan Perbup tetang Tupoksi dan Organisasi Perangkat Daerah yang dihasilkan	Perda/ Perbup		10		**60**		
		S.4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Persentase Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat					**%**		**30**				

			pelaporan yang benar dan tepat waktu		waktu											
						Terselenggaranya pemerintahan desa yang baik	Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik			%		30				
								Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	**Persentase peningkatan SDM Pemdes dan Pilkades**			**100 %**	**134,300,000**		**134,300,000**	**BAG. PEMERINTAHAN & OTDA**

								Kegiatan : Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Orang	180	174	108,750,000	174	108,750,000	
								Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Desa yang dimonev bidang penyelenggaraan pemdes	Desa		16	25,550,000	16	25,550,000	
								Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**%**		**100**	**44,000,000**		**44,000,000**	**BAG. PEMERINTAHAN & OTDA**

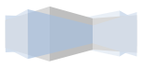

								Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Waktu pemberian stimulan kepada Demang Kepala Adat (2 orang)	Bulan		12	44,000,000	12	44,000,000	
								Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	**Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar Kabupaten**	**%**		**100**	**163,575,000**		**237,125,000**	**BAG. PEMERINTAHAN & OTDA**
								Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Jumlah Berita Acara Kesepakatan tata batas administrasi	BA		10	163,575,000	20	237,125,000	
								Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik					0			

								pertanahan								
								Program pendidikan politik masyarakat	**Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan pemilihan Kepala Daerah**	**%**		**100**	**57,000,000**		**57,000,000**	**BAG. PEMERINTAHAN & OTDA**
								Monitoring dan Pelaporan Pemilu	Jumlah Laporan pelaksanaan Pemilu Tahun 2017	Laporan		10	57,000,000	10	57,000,000	
2	Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti	S4. Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	- sbg fungsi pendukung (bukan skpd teknis penanggung jawab indikator sasaran)	Meningkatkan Pengendalian perekonomian dan SDA	Persentase hasil monev bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti					**%**		**76.19**				

	luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energy dengan memperhatikan lingkungan hidup															
						Persentase hasil monev bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Pengendalian perekonomian dan SDA			%		76.19				
								Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalis	**Persentase jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU**	%		100	1,155,000,000		2,864,000,000	**BAG. PEREKONOMIAN, INFRASTRUKT & SDA**

								trikan	**di 6 Kecamatan Kab. Kobar**							
								Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur tenaga listrik	Jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 kecamatan Kab. Kobar	Paket		5	1,155,000,000	14	2,864,000,000	
								Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan	**Persentase jumlah pengelolaan air permukaan sesuai dengan aturan perundang-undangan**	**%**		**100**	**30,000,000**			**BAG. PEREKONOMIAN, INFRASTRUKT & SDA**
								Kegiatan Pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan	Jumlah inventarisasi pemanfaatan air permukaan di	dok		3	30,000,000	9	60,257,000	

									kecamatan							
								Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	**Persentase jumlah pendistribusian BBM dan LPG tepat sasaran sesuai ketetapan pemerintah**			**100 %**	**50,000,000**			**BAG. PEREKONOMIAN, INFRASTRUKT & SDA**
								Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah laporan pengawasan, penyaluran BBM dan LPG di 6 Kecamatan	dok		6	50,000,000	12	88,400,000	
3	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan	S.1.Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Persentase penurunan konflik antar umat	Meningkatkan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan												

	bermasyarakat		beragama													
					Meningkatnya pelayanan di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	Peningkatan kepedulian Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Keagamaan dan Kemasyarakatan	persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan			%		**40**				
								Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	**persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan**	%		**40**	**448,205,000**		**1,089,555,000**	**BAG. KESRA**
								Kegiatan Pelayanan ibadah Haji	Pelayanan ibadah Haji	Jumlah calon/ jemaah haji yang dapat terlayani (berdasarkan	orang	148	448,205,000	308	1,089,555,000	

										kuota yang ditetapkan pemerintah pusat)						
								Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	**Persentase jumlah kegiatan pemerintah daerah di bidang mental dan keagamaan**	%		**100**	**136,050,000**		**2,613,854,631**	**BAG. KESRA**
								Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah desa di Kecamatan yang dikunjungi dalam kegiatan safari ramadhan	desa		6	136,050,000	12	2,613,854,631	

										TOTAL	27,766,914,000				

MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DALAM RENSTRA SKPD YANG TELAH SINKRON DENGAN RPJMD SEBELUM MENGALAMI *REVIEW*

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL RENSTRA (2016)	2018		KINERJA AKHIR RENSTRA		BIDANG OPD
												Target	Rp	Target	Rp	
1	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.	S2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	Peningkatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah					%		100				
						Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP			Nilai		B				

						Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten									
								Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	**Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi**	**%**		**60**	**199,358,000**	**100%**	**199,358,000**	**BAG. ORGANISASI**
								Keg. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKIP RKT, PK Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersusun	Dokumen		3	145,906,000	3	145,906,000	
								Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja	Jumlah dokumen ANJAB & ABK Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersusun	Dokumen		1	53,452,000	1	53,452,000	

				Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks kepuasan aparatur											
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran			**%**		**97**				
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**%**		**97**	**12,817,368,760**	**100**	**76,620,060,053**	**BAG. UMUM**
								Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat/ paket yang tersampaikan	Pucuk surat/ kg paket		840 Pucuk, 75 kg paket	6,050,000	3680 pucuk, 350 paket	39,900,000	
								Kegiatan Penyediaan jasa	Waktu penyediaan rekening	bulan		12	4,507,500,000	72	27,830,130,000	

								komunikasi, sumber daya air dan listrik	listrik, air, telepon, internet dan surat kabar							
								Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tahun		1	383,562,500	6	2,094,925,000	
								Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Orang		7	140,000,000	123	1,119,500,000	
								Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	Jumlah gedung/ barang milik daerah yang diasuransikan	Gedung		4	430,000,000	24	860,550,000	
								Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan	unit		101	71,150,000	581	413,525,000	

								kendaraan dinas operasional	dan perizinan							
								Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Bulan		12	2,661,575,200	72	15,898,357,400	
								Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan		12	965,047,500	72	5,371,572,800	
								Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	unit/ tahun		135	114,550,000	953	1,001,582,000	
								Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	jenis ATK		45	179,107,500	270	1,129,982,500	
								Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaa	Jumlah persediaan barang cetakan	Jenis		15	169,745,000	110	1,147,345,000	

								n								
									Jumlah Penggandaan	Lembar		250000		251,630		
								Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen dan instalasi listrik yang disediakan	Jenis/ komponen		35	73,571,060	195	435,541,560	
								Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	jenis		48	399,350,000	288	2,379,175,000	
								Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis		7	336,660,000	47	747,910,000	
								Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan minuman, rapat, dan tamu kerja	bulan		12	1,219,500,000	72	7,739,738,500	

									yang disediakan							
								Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	OK		335	1,160,000,000	1,720	8,410,325,293	
						Meningkatkan tatakelola organisasiyang akuntabel dan profesional	Persentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur			%		**90**				
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**%**		**90**	**10,817,495,000**	**95**	**63,227,103,800**	**BAG. UMUM**
								Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun	Unit		1	4,000,000,000	1	12,500,000,000	
								Kegiatan Pembanguna	Jumlah gedung kantor yang	unit		2	3,235,000,0	7	27,268,069	

								n Gedung Kantor	dibangun				00		,600	
								Kegiatan Pengadaan Mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	unit		2	1,210,000,000	4	2,904,877,500	
								Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah gedung/kantor yang diadakan	jenis		10	310,300,000	63	2,297,907,070	
								Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Jenis		8	139,400,000	38	1,639,400,000	
								Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	jenis		5	165,300,000	37	565,300,000	
								Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama	Jumlah perlengkapan gedung asrama yang diadakan	jenis		2	78,225,000	6	228,225,000	
								Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	unit		2	110,250,000	12	1,133,750,000	

								rutin/berkala rumah jabatan	rutin/ berkala							
								Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	unit		4	123,845,000	24	2,228,297,000	
								Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/ berkala	unit		4	356,400,000	24	2,051,200,000	
								Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/ berkala	unit		89	316,500,000	534	2,671,307,200	
								Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	unit		100	83,620,000	400	346,300,000	

								Kantor								
								Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab	unit		2	63,000,000	13	953,000,000	
								Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	unit		3	236,250,000	20	2,854,942,930	
								Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung asrama	Jumlah asrama mahasiswa yang direhab	unit		2	389,405,000	3	589,405,000	
								Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**%**		**100**	**38,000,000**		**182,000,000**	**BAG. UMUM**

								Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Dok		**2**	3,000,000	12	22,000,000	
								Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dok		**2**	35,000,000	12	160,000,000	
								Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Tingkat Kepatuhan Aparatur**	**%**		**90**	**378,250,000**	**95**	**2,070,750,000**	**BAG. UMUM**
								Kegiatan Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Jumlah mesin/ kartu absensi yang diadakan	unit		4	30,000,000.00	10	100,000,000	
								Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stell		219	44,000,000	1,314	936,950,000	
								Kegiatan Pengadaan	Jumlah pakaian	stell		227	304,250,00	1,362	1,033,800,	

								Pakaian khusus hari-hari tertentu	khusus hari-hari tertentu yang diadakan				0		000	
								Prog. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	**Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**%**		**21**	**321,000,000**	**28**	**2,042,500,000**	**BAG. ORGANISASI**
								Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dan pelatihan	OK		38	321,000,000	244	2,042,500,000	
		S.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan E-Gov	Meningkatkan tata kelola pelayanan yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Capaian Standar Pelayanan pengelolaan LPSE					**%**		**71**				

						Meningkatnya informasi dan kualitas layanan pengadaan secara elektronik	Capaian Standar Pelayanan pengelolaan LPSE			**%**		**71**				
								Program Pengembangan data/ informasi bidang pengadaan	**Jumlah sistem informasi bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang yang diterapkan dalam mendukung E-gov**	**Sistem Informasi**		**1**	**210,802,500**	**1**	**1,675,214,500**	**BAG. ADM. PEMBANGUNAN**
								Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	- Jumlah data perusahaan yang diverifikasi/ mendapatkan fasilitasi agregasi & laporan pengaduan permasalahan LPSE serta	Data	36	**36**	210,802,500	36	210,802,500	

									data SKPD/ PPK/ Panitia/ Pejabat Pengadaan yang memperoleh akun dalam SPSE							
									- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LPSE	Orang		**100**		100		
									- Jumlah peserta asistensi SiRUP	SKPD		**38**		38		
								Prog. Penyusunan kebijakan dan administrasi pembangunan	**Persentase data dan informasi bidang administrasi pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan**	**%**		**100**	**320,181,000**	**100**	**320,181,000**	

								Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah rancangan dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran Setda yang dihasilkan	Dok	12	25	10,400,000	25	10,400,000	
								Kegiatan Peningkatan Manajemen bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah peserta bimtek/ sosialisasi dalam rangka peningkatan kompetensi Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Orang		100	169,201,000	100	169,201,000	
									Jumlah laporan SDDKN	Dok		2		2		
								Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pmbangunan	Jumlah Laporan dan dokumentasi Monev Program/ kegiatan	Dok	2	2	140,580,000	2	964,630,000	

									pembangunan							
									Jumlah laporan monev online & monev SiRUP	Dok		24		24		
									Website bag. Adm. Pembangunan yang dikelola	web		1		1		
									Jumlah laporan monev pemberian hibah dan bansos	Eksp		12		12		
						Meningkatnya kapasitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Capaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel			%		**100**				

								Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	**Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui ULP**	**%**		**100**	**839,860,000**		**5,164,860,000**	**BAG. LAYANAN PENGADAAN BARANG & JASA**
								Keg. Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa	Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa	Orang		150	761,740,000	750	3,861,740,000	
									Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa desa	Orang		200		1,000		
									Tingkat kematangan organisasi pengadaan	level		3		24		
								Keg. Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa	Jumlah penyelesaian kasus/permasalahan pengadaan	Kasus		20	45,150,000	100	745,150,000	

									barang/jasa (pengaduan, sanggahan dan konsultasi)							
								Keg. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Monitoring evaluasi PBJ Desa di Kecamatan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Kobar	Kec		6	32,970,000	36	557,970,000	
						Meningkatnya dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Ktw. Barat yang dapat diakses oleh masyarakat	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan dokumentasi dan informasi hukum			Nilai/ Skor		**C**				
								Program Penataan Peraturan	**Persentase produk hukum yang dapat**	**%**		**100**	**473,913,800**	**100%**	**1,189,013,800**	**BAG. HUKUM**

								Perundang-undangan	**diakses masyarakat**							
								Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah	Jumlah Perda ditetapkan	Perda		10	177,700,000	20	Rp 584,300,000	
									jumlah peraturan Bupati dan keputusan Bupati ditetapkan	Perbup/ SK		60		120		
								Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lembaran Daerah dan Berita Daerah diterbitkan	Dok		60	59,238,800	120	102,738,800	
									Jumlah Himpunan Perda yang disebarluaskan	buku		120		240		
									Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses masyarakat	Dok		210		420		

								Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Desa/ kelurahan tersosialisasi	Desa		10	236,975,000	20	**501,975,000**	
									Jumlah Kelompok Kadarkum dan Desa Binaan Sadar Hukum	Kelompok dan Desa		10		20		
								Program Pembinaan dan pelayanan hukum	**Persentase permasalahan hukum tertangani**	**%**		**100**	**387,700,000**	**100**	**1,517,400,000.00**	**BAG. HUKUM**
								Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah Rapat-Rapat Permasalahan Hukum oleh Tim Khusus	Kali		12	387,700,000	24	1,517,400,000	
									Jumlah Dokumen Adminsitrasi Beracara di Pengadilan	Dokumen		2		4		
									Jumlah Jasa Advokasi/Pengacara	Paket		1		2		
									Jumlah bantuan	Permasalahan		7		12		

									hukum kepada Aparatur dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	hukum						
								Prog Peningkatan kesadaran dan pemahaman Hak sasi Manusia	**Angka pelanggaran HAM**				**68,400,000**		**142,800,000**	**BAG. HUKUM**
								Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi/ Sosialisasi Hak Asasi Manusia	kali		2	68,400,000	4	142,800,000	
									Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Panitia RANHAM dan Pokja	kali		6		12		
						Terpublikasikan dan terdokumentasikannya kegiatan	Persentase tersebarnya			**%**		**80**				

						Pemerintah Daerah dengan baik	informasi kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat									
								Program Penyebaran Informasi dan Dokumentasi	**Persentase Publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah**	**%**		**80**	**424,649,500**	**80%**	**424,649,500**	**BAG. PROTOKOL & KOMUNIKASI**
								Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumentasi Naskah Sambutan/ Pidato Bupati	buku		200	42,660,000	**200**	**42,660,000**	
									Jumlah dokumentasi data dan informasi dari mediadalam bentuk kliping	exp		356		**356**		
								Kegiatan Peliputan	Jumlah Peliputan	kali		13	381,989,50	13	**381,989,50**	

								dan publikasi Pemerintah Daerah	Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan dan luar daerah				0		**0**	
								Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH	**Persentase pelayanan kedinasan KDH/ WKDH yang terlaksana baik**	%		**90**	**2,074,587,240**	**90**	**4,002,627,340**	**BAG. PROTOKOL & KOMUNIKASI**
								Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Tahun		1	674,437,240	**2**	**1,345,477,340**	
									Jumlah kegiatan rapat Forkopimda yang diselenggarak	kali		15		**30**		

									an							
								Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri yang diterima	kali		30	484,150,000	**60**	**831,450,000**	
								Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	kali		80	167,000,000	**160**	**476,700,000**	
								Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti oleh KDH/ WKDH	OK		20	670,000,000	**40**	**1,270,000,000**	

								Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah jasa keprotokolan	kali		20	79,000,000	**20**	**79,000,000**	
			Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD											
						Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kabupaten	Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD			**%**		65				
								Program Pembinaan dan pengembangan organisasi	**Persentase SKPD yang memiliki SOP bidang administrasi**	**%**		**100**	**260,812,000**	**100%**	**1,985,322,912**	**BAG. ORGANISASI**

									dan pemerintahan							
								Keg. Penyusunan, Penataan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah peserta sosialisasi SOP dan Pelayanan Publik (atau sejenisnya)	Orang		100	90,530,000	500	90,530,000	
									Jumlah laporan hasil survey IKM SKPD	SKPD		5		31		
								Kegiatan Peningkatan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah profil kelembagaan yang dihasilkan	Dokumen		1	170,282,000	6	1,335,322,912	
									Jumlah dokumen SPM yang dibuat	Dokumen		3		18		

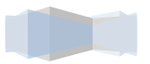

									Jumlah Perda dan Perbup tetang Tupoksi dan Organisasi Perangkat Daerah yang dihasilkan	Perda/ Perbup		10		60		
		S.4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Persentase Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu					%		**70**				
						Terselenggaranya pemerintahan desa yang baik	Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa			%		**70**				

							dengan baik									
								Prog. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang memiliki dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu**	**Desa**		**16**	**148,000,000**			**BAG. PEMERINTAHAN & OTDA**
								Kegiatan : Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Orang	180	162	84,000,000	162	84,000,000	
								Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Waktu pemberian stimulan kepada Demang Kepala Adat (2	Bulan	12	12	44,000,000	12	44,000,000	

									orang)							
								Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Desa yang dimonev bidang penyelenggaraan pemdes	Desa	N/A	16	20,000,000	16	20,000,000	
								Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**			**100 %**	**73,000,000**		**73,000,000**	
								Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD yang dihasilkan	Dok		**1**	73,000,000	1	73,000,000	
									Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan LPPD	SKPD		**38**		38		

								Program Penataan Daerah Otonomi Baru	**Persentase Jumlah kecamatan baru yang terbentuk**	**%**		**33**	**294,000,000**	**33**	**294,000,000**	
								Penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	Jumlah dokumen kesiapan Desa dan Kelurahan dalam pembentukan Kecamatan	Dok		**3**	294,000,000	3	294,000,000	
								Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	**Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar Kabupaten**	**%**		**100**	**73,550,000**		**237,125,000**	BAG. PEMERINTAHAN & OTDA
								Penyelesaian Masalah Perbatasan antar daerah	Jumlah Berita Acara Kesepakatan tata batas administrasi	BA		10	73,550,000	20	237,125,000	
								Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	**Jumlah MoU yang disepakati**	**Dokumen MoU**		**4**	**96,300,200**	**4**	**96,300,200**	

								Kerjasama antar Daerah/ Pihak Ketiga	Jumlah Pengajuan/ Penawaran Kerjasama dengan Daerah Lain/ Pihak Ketiga	Dokumen		**5**	96,300,200	5	96,300,200	
								Prog. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	**Jumlah SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang revisi terbaru Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) kawasan Hutan Primer dan Gambut**	**SK**		**1**	**95,000,000**	**1**	**95,000,000**	**BAG. PEMERINTAHAN & OTDA**
								Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah laporan hasil survey dan peta serta SK pelepasan areal lahan gambut	Dok		**1**	95,000,000	1	95,000,000	

2	Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energy dengan memperhatikan lingkungan hidup	S4. Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	- sbg fungsi pendukung (bukan skpd teknis penanggung jawab indikator sasaran)	Meningkatkan Pengendalian perekonomian dan SDA	Persentase hasil monev bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti					%		**76.19**				

						Persentase hasil monev bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Pengendalian perekonomian dan SDA			%		**76.19**				
								Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	**Persentase jumlah kegiatan pendampingan yang diikuti dalam rangka peningkatan promosi dan kerjasama investasi**	**%**		**80**	**88,550,000**	**80%**	**88,550,000**	**BAG. PEREKONOMIAN, INFRASTRUKT & SDA**
								Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah kegiatan PENAS KTNA dan PEDA KTNA yang diikuti	keg	0	3	48,000,000	3	48,000,000	
								Pengembangan promosi daerah dan investasi	Jumlah kegiatan pameran/ expo dan rakor TPID yang diikuti	Keg	0	2	40,550,000	2	40,550,000	

								Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	**Persentase jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 Kecamatan Kab. Kobar**	**%**		**40**	**1,709,000,000**	**40**	**2,864,000,000**	
								Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur tenaga listrik	Jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 kecamatan Kab. Kobar	Paket		**9**	1,709,000,000	14	2,864,000,000	
								Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan	**Persentase jumlah pengelolaan air permukaan sesuai dengan aturan perundang-undangan**	**%**		**100**	**30,257,000**		**60,257,000**	
								Kegiatan Pengelolaan air bawah tanah dan air	Jumlah inventarisasi pemanfaatan air permukaan	dok		**6**	30,257,000	9	60,257,000	

								permukaan	di kecamatan							
								Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	**Persentase jumlah pendistribusian BBM dan LPG tepat sasaran sesuai ketetapan pemerintah**	%		100	38,400,000		88,400,000	
								Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah laporan pengawasan, penyaluran BBM dan LPG di 6 Kecamatan	dok		6	38,400,000	12	88,400,000	
								Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	**Persentase ketersediaan data inventarisasi wilayah penambangan rakyat tanpa ijin**	%		100	71,600,000		71,600,000	

								Kegiatan Monitoring dan Inventarisasi / Pendataan Wilayah Penambangan Rakyat	Jumlah inventarisasi Penambang rakyat di Kotawaringin Barat	dok	0	**6**	71,600,000	6	71,600,000	
3	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat	S.1.Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan	Persentase penurunan konflik antar umat beragama	Peningkatan kepedulian Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Keagamaan dan Kemasyarakatan											
						Meningkatnya pelayanan di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan			**%**		**40**				

								Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	**persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan**	**%**		**40**	**1,722,369,800**		**2,170,574,800**	**BAG. KESRA**
								Kegiatan Pelayanan ibadah Haji	Jumlah calon/ jemaah haji yang dapat terlayani (berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat)	orang		160	641,350,000	308	1,089,555,000	
								Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Penghulu	Jumlah penghulu Non PNS yang diberikan insentif	orang		38	283,220,000	38	283,220,000	
								Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana peribadatan	Jumlah laporan Rumah Ibadah yang dimonitoring dan dievaluasi	Dok		1	66,224,800	1	66,224,800	
								Kegiatan Pemberdayaan Tokoh	Jumlah Guru Ngaji yang diberikan	orang		170	731,575,000	170	731,575,000	

								Agama	insentif							
									Jumlah dialog antar tokoh agama	kali		1		1		
								Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan , Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	**Persentase jumlah kegiatan pemerintah daerah di bidang mental dan keagamaan**	**%**		**100**	**2,477,804,631**		**2,837,284,631**	**BAG. KESRA**
								Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah desa di Kecamatan yang dikunjungi dalam kegiatan safari ramadhan	desa		**6**	2,477,804,631	12	2,613,854,631	
									Jumlah rumah ibadah dan rukun kematian yang akan mendapatkan bantuan	Rumah ibadah dan RK		**6**		6		

									peralatan dan perlengkapan ibadah							
									Jumlah Pemuda yang mengikuti sosialisasi keagamaan	orang		**200**				
									Jumlah ASN yang mengikuti pengajian	orang		**500**				
								Program Pembinaan Kemasyarakatan	**Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dievaluasi**	**%**		**100**	**223,430,000**		**223,430,000**	
								Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kemasyarakatan	Jumlah Laporan bahan kebijakan bidang kemasyarakatan	Dok	0	1	22,790,000	1	22,790,000	
								Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan bahan kebijakan bidang kesehatan dan	Dok	0	1	22,790,000	1	22,790,000	

								dan Kesejahteraan Sosial	kesejahteraan sosial							
								Kegiatan peningkatan kesadaran kesehatan sekolah	Jumlah penilaian Lomba Sekolah Sehat	sekolah	0	24	135,100,200	24	135,100,200	
								Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap lembaga kemasyarakatan	Jumlah laporan monev lembaga kemasyarakatan	dokumen	0	1	42,749,800	1	42,749,800	
									Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan/ hibah	dokumen	0	1		1		
										TOTAL		**36,773,639,431**				

PENYESUAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019-2022

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	SATUAN TARGET	TARGET				Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			19	20	21	22				Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	80	80	82	84	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Kualitas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Nilai	341,494,000	80	350,000,000	80	350,000,000	85	350,000,000	90	Keg. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKIP RKT, PK, ANJAB & ABK Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersusun
																			Jumlah peserta kegiatan asistensi LKjIP
																			Jumlah peserta kegiatan sosialisasi LHKPN
							Program Pembinaan dan pengembangan organisasi	Persentase PD Pelayanan Publik yang nilai IKMnya sesuai dengan target IKU Daerah	%	829,451,500	85	336,905,000	85	500,000,000	90	475,000,000	95	Keg. Penyusunan, Penataan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah peserta sosialisasi SOP atau Pelayanan Publik
																			Jumlah laporan hasil survey IKM SKPD
								Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi	%		84.21		84.21		86.84		97.37	Kegiatan Peningkatan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah profil kelembagaan yang dihasilkan
																			Jumlah Ranperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dihasilkan
																			Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi
																			Jumlah laporan monev kelembagaan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	2.9	2.9	3	3.05	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase kesesuaian skor IKK dengan data pendukung yang disampaikan SKPD	%	3,633,097,900	85	563,490,500	85	940,000,000	95	1,150,000,000	100	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD yang disusun
																			Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan LPPD
								Persentase Kepala Desa yang menyampaikan LPPDes kepada Kepala Daerah	%		60		60		75		85	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
																			Waktu pemberian stimulan kepada Demang Kepala Adat (2 orang)
																			Jumlah peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam bidang tata kelola pemerintahan kelurahan
																			Jumlah Desa yang dimonev bidang penyelenggaraan pemdes

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	SATUAN TARGET	TARGET				Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			19	20	21	22				Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		
																		Pemilihan Kepala Desa	Jumlah SK Bupati tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa yang dibuat
																		Monitoring dan Pelaporan Pemilu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemilu yang dihasilkan
								Persentase usulan terbentuknya daerah pemekaran baru yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100	Penyiapan data dan informasi pembentukan, penataan dan pengembangan wilayah	Jumlah data kesiapan pemekaran kecamatan
																			Jumlah Ranperda pemekaran kecamatan dan Kelurahan
																			Jumlah Ranperbup pemekaran desa
																			Jumlah laporan hasil monev penataan dan pengembangan wilayah
								Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar Kabupaten	%		10.64		11.70		19.15		27.66	Penyelesaian Masalah Perbatasan antar daerah	Jumlah Ranperbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dihasilkan
																			Jumlah Peta Batas yang dibuat
																			Jumlah Pilar Batas Kabupaten yang terpasang
								Persentase Penawaran Kerjasama Pemerintah Daerah yang disepakati	%		90		90		92		95	Kerjasama antar Daerah/ Pihak Ketiga	Jumlah Penawaran Kerjasama dengan Daerah Lain/ Pihak Ketiga yang diajukan dan diterima
Tercapainya penyelesaian konflik pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	%	75	75	80	80	Prog. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	%	89,650,000	40	89,650,000	75	400,000,000	80	500,000,000	80	Penyiapan Data dan Identifikasi Awal Lahan gambut	Jumlah laporan hasil survey dan peta serta SK pelepasan areal lahan gambut
																		Penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang dapat terselesaikan
Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	%	85	85	88.8	92	Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan	Persentase Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan Perencanaan Anggaran SKPD	%	524,188,300	90	580,693,923	90	715,000,000	95	750,000,000	100	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	- Jumlah peserta Bimtek/ asistensi SiRUP yang dapat menyusun Rencana Umum Pengadaan dengan baik
																			- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LPSE
																			- Jumlah laporan data perusahaan yang diverifikasi/ mendapatkan fasilitasi agregasi & laporan pengaduan permasalahan LPSE serta data SKPD/ PPK/ Panitia/ Pejabat Pengadaan yang memperoleh akun dalam SPSE
																			- Jumlah SKPD yang dievaluasi Rencana Umum Pengadaannya

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	SATUAN TARGET	TARGET				Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			19	20	21	22				Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		
								Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		80		80.1		80.2		80.3	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RKT, Perjanjian Kinerja, Renja, Rencana Aksi Kinerja, Reviu Renstra, Reviu/ Perubahan IKU) yang disusun
																			Jumlah dokumen pengendalian dan realisasi anggaran program dan kegiatan yang disusun
																			Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang disusun
																			Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah yang disusun
																			Jumlah laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan progres rencana aksi Perangkat Daerah yang disusun
																			Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah yang disusun
								Persentase Data Dukungan Kebijakan Nasional yang dapat terpenuhi	%		70		70		75		80	Kegiatan Peningkatan Manajemen bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan SDDKN yang disusun
																			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek dan asistensi SDDKN
								Persentase capaian realisasi APBD yang sesuai dengan target	%		90		90		95		98	Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun
																			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil program/ kegiatan pembangunan yang disusun
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	2	2	3	3	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	%	854,066,500	55	834,990,700	100	925,000,000	50	1,025,000,000	100	Keg. Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa	Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa
																			Jumlah laporan Tepra (Progres PBJ Kab. Ktw. Barat) yang disusun
																			Jumlah bukti dukung variabel penilaian kematangan UKPBJ yang terverifikasi

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	SATUAN TARGET	TARGET				Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			19	20	21	22				Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		
																		Keg. Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa	Jumlah kasus/ permasalahan pengadaan barang/jasa (pengaduan, sanggahan dan konsultasi) yang terselesaikan
																		Keg. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan evaluasi pengadaan barang/ jasa Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun
																			Jumlah laporan monev PBJ Desa yang disusun
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	%	75	75	80	85	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang mendapatkan fasilitasi/ evaluasi Pemerintah Provinsi	%	990,256,350	75	792,160,300	75	910,000,000	80	990,000,000	85	Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah	Jumlah Rancangan Perda dan Perbup yang mendapatkan fasilitasi dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Kepala Daerah
								Persentase produk hukum daerah yang tersosialisasi dan terpublikasi	%		100		100		100		100	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Himpunan Perda dan Perbup yang disebarluaskan
																			Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses masyarakat
																		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
																			Jumlah Kelompok Kadarkum yang mendapatkan pembinaan
								Persentase permasalahan hukum daerah yang dapat ditindaklanjuti	%		75		75		80		85	Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah perkara/ permasalahan litigasi/ non litigasi yang ditangani
								Kualitas Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat	Nilai		75		75		75		100	Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah peserta Diseminasi/ Sosialisasi Hak Asasi Manusia
																			Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Panitia RANHAM dan Pokja
Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	93	93	94.2	95.6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	13,508,754,050	85	13,785,576,700	85	14,294,000,000	87	16,095,500,000	90	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah paket/ surat yang terkirim
																		Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
																		Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	SATUAN TARGET	TARGET				Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			19	20	21	22				Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		
																		Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH, WKDH, pimpinan/anggota DPRD	Jumlah jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH, WKDH yang disediakan
																		Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	Jumlah gedung/barang milik daerah yang diasuransikan
																		Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
																		Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan
																		Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan
																		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan
																		Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
																		Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
																		Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
																		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
																		Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan
																		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman
																		Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
																		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi KDH/ WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dilaksanakan oleh KDH dan WKDH
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	10,343,660,900	93	12,008,577,300	93	11,842,416,399	94	12,340,000,000	95	Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun
																			Jumlah bangunan penunjang di lokasi Rumah Jabatan yang dibangun/ ditingkatkan kapasitasnya
																		Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun
																			Jumlah sarana gedung kantor yang dibangun/ ditingkatkan kapasitasnya
																		Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
																		Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	SATUAN TARGET	TARGET				Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			19	20	21	22				Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		
																		Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
																		Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
																		Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan
																		Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan
																		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/ berkala
																		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/ berkala
																		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala
																			Jumlah sarana/ prasarana gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala
																		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/ berkala
																		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/ berkala
																		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
																		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
																		Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhabilitasi sedang/berat
																		Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat
																		Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab
																		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama	Jumlah perlengkapan gedung asrama yang diadakan
																		Kegiatan penyediaan jasa sewa asrama mahasiswa	Jumlah asrama mahasiswa yang disewa
																		Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung asrama	Jumlah gedung asrama yang direhabilitasi sedang/berat
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	50,770,000	99	63,000,000	99	63,500,000	100	64,000,000	100	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
																		Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	326,500,000	96	357,500,000	96	375,000,000	97	405,000,000	98	Kegiatan Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Jumlah mesin/ kartu absensi yang diadakan

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	SATUAN TARGET	TARGET				Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			19	20	21	22				Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		
																		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
																		Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
							Prog. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	479,000,000	92	319,500,000	92	400,000,000	93	425,000,000	95	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dan pelatihan
Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Nilai	85	85	90	95	Program penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi publik	Persentase kegiatan pimpinan daerah, kunjungan tamu daerah serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang terpublikasi dan terdokumentasi	%	2,293,045,000	85	1,897,700,000	85	2,020,000,000	90	2,264,193,827	95	Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumentasi Naskah Sambutan/ Pidato Bupati yang dikumpulkan
																			Jumlah dokumentasi data dan informasi dari media dalam bentuk kliping
																		Kegiatan Peliputan dan publikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan dan luar daerah
																			Jumlah kegiatan pameran pembangunan/ publikasi pemerintah daerah yang diikuti
																			Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk buletin, album, DVD, spanduk dan sejenisnya
																		Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat yang difasilitasi
																		Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri yang diterima
																		Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah
																		Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah jasa keprotokolan yang dilaksanakan
Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	%	75	75	76	76	Program Pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase laporan monev dan pengendalian bidang perekonomian yang dihasilkan	%	120,488,800	90	120,139,377	93	140,000,000	95	160,000,000	97	Pemantauan dan Evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah	jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah yang dihasilkan

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	SATUAN TARGET	TARGET				Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			19	20	21	22				Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		
																		Pengendalian dan pemantauan sarana perekonomian	Jumlah laporan pengendalian dan pemantauan sarana perekonomian yang ditindaklanjuti
	Persentase Desa dan Kelurahan yang telah terfasilitasi Penerangan Jalan Umumnya	%	64.9	67.0	68.0	69.0	Program peningkatan infrastruktur, pengendalian energi dan Sumber Daya Alam	Persentase jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang	%	1,889,735,000	21	4,098,090,000	49.14	4,070,000,000	31	5,080,000,000	32	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Tenaga Listrik	Jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 kecamatan Kab. Kobar
																			Jumlah database PJU yang disusun
																		Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan data potensi sumber daya alam yang dihasilkan
Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai/ skor	70	70	75	80	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Persentase pelayanan dan fasilitasi di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	%	5,835,429,700	90	6,328,309,200	90	6,735,000,000	90	7,255,000,000	90	Kegiatan Pelayanan, pembinaan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan	Jumlah calon/ jemaah haji yang dapat terlayani
																			Jumlah penghulu Non PNS yang diberikan insentif
																			Jumlah laporan Rumah Ibadah yang dimonitoring dan dievaluasi
																			Jumlah Guru Ngaji yang diberikan insentif
																			Jumlah dialog antar tokoh agama
																			Jumlah desa di Kecamatan yang dikunjungi dalam kegiatan safari ramadhan
																			Jumlah rumah ibadah dan rukun kematian yang akan mendapatkan bantuan peralatan dan perlengkapan ibadah
																			Jumlah Pemuda yang mengikuti sosialisasi keagamaan
																			Jumlah ASN yang mengikuti pengajian
																			Jumlah peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan
																			Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan
																			Jumlah Guru Mengaji yang mendapatkan pelatihan
																			Jumlah kegiatan LPTQ/MTQ yang dilaksanakan
																			Jumlah tokoh agama non muslim yang diberikan insentif
																		Kegiatan Penyusunan bahan Kebijakan dan peningkatan kesadaran Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan bahan kebijakan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial

Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	SATUAN TARGET	TARGET				Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			19	20	21	22				Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		
																			Jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan
																			Jumlah penilaian Lomba Sekolah Sehat
																		Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kemasyarakatan	Jumlah laporan monev lembaga kemasyarakatan yang disusun
																			Jumlah dokumen lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan/ hibah
										42,109,588,000		42,526,283,000		44,679,916,399		49,328,693,827			

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggung Jawab
			Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
Keg. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKIP RKT, PK, ANJAB & ABK Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersusun	Dokumen	341,494,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	Subag Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah & Anjab ABK
	Jumlah peserta kegiatan asistensi LKjIP	Orang		100		100		100		100	
	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi LHKPN	Orang		100		100		100		100	
Keg. Penyusunan, Penataan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah peserta sosialisasi SOP atau Pelayanan Publik	Orang	81,805,000	100	100,000,000	100	250,000,000	100	200,000,000	100	Subag Tatalaksana
	Jumlah laporan hasil survey IKM SKPD	laporan/ SKPD		6		7		7		7	
Kegiatan Peningkatan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah profil kelembagaan yang dihasilkan	Dokumen	747,646,500	1	236,905,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	Subag Kelembagaan & Kepegawaian
	Jumlah Ranperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dihasilkan	Ranperda		1		1					
	Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi	SKPD		38		38		38		38	
	Jumlah laporan monev kelembagaan	Laporan		-		6		6		6	
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD yang disusun	Dok	45,925,000	1	45,500,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	Subag Otonomi Daerah
	Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan LPPD	SKPD		0		0		38		38	
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Orang	249,624,700	170	149,990,000	200	175,000,000	180	225,000,000	180	Subag Otonomi Daerah
	Waktu pemberian stimulan kepada Demang Kepala Adat (2 orang)	Bulan		12		12		12		12	
	Jumlah peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam bidang tata kelola pemerintahan kelurahan	Orang		0		43		43		43	
	Jumlah Desa yang dimonev bidang penyelenggaraan pemdes	Desa		16		16		16		17	

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggung Jawab
			Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
Pemilihan Kepala Desa	Jumlah SK Bupati tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa yang dibuat	SK	2,997,090,900	45							
Monitoring dan Pelaporan Pemilu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemilu yang dihasilkan	Dok.	14,200,000	1	-	0	65,000,000	3	75,000,000	3	Subag Otonomi Daerah
Penyiapan data dan informasi pembentukan, penataan dan pengembangan wilayah	Jumlah data kesiapan pemekaran kecamatan	Dok	109,752,500	3	110,000,000	3	200,000,000	1	300,000,000	1	Subag Otonomi Daerah
	Jumlah Ranperda pemekaran kecamatan dan Kelurahan	Ranperda		2		1		1		1	
	Jumlah Ranperbup pemekaran desa	Ranperbup		1		2					
	Jumlah laporan hasil monev penataan dan pengembangan wilayah	dokumen		8		10		8		8	
Penyelesaian Masalah Perbatasan antar daerah	Jumlah Ranperbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dihasilkan	Ranperbup	108,104,900	5	173,000,000	6	200,000,000	7	200,000,000	8	Subag Pemerintahan Umum
	Jumlah Peta Batas yang dibuat	Peta		0		8		7		8	
	Jumlah Pilar Batas Kabupaten yang terpasang	unit		0		13		15		17	
Kerjasama antar Daerah/ Pihak Ketiga	Jumlah Penawaran Kerjasama dengan Daerah Lain/ Pihak Ketiga yang diajukan dan diterima	Dokumen	108,399,900	10	85,000,500	10	150,000,000	12	200,000,000	15	Subag Hubungan Kerjasama
Penyiapan Data dan Identifikasi Awal Lahan gambut	Jumlah laporan hasil survey dan peta serta SK pelepasan areal lahan gambut	Dok	89,650,000		-	0	300,000,000	1	400,000,000	1	Subag Pemerintahan Umum
Penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang dapat terselesaikan	permasalahan		3	89,650,000	3	100,000,000	5	100,000,000	5	Subag Pemerintahan Umum
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	- Jumlah peserta Bimtek/ asistensi SiRUP yang dapat menyusun Rencana Umum Pengadaan dengan baik	Orang	208,579,900		190,706,565	148	200,000,000	145	225,000,000	145	Subag LPSE & Adm. Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan
	- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LPSE	Orang		145		145		100		100	
	- Jumlah laporan data perusahaan yang diverifikasi/ mendapatkan fasilitasi agregasi & laporan pengaduan permasalahan LPSE serta data SKPD/ PPK/ Panitia/ Pejabat Pengadaan yang memperoleh akun dalam SPSE	Laporan		36		36		36		36	
	- Jumlah SKPD yang dievaluasi Rencana Umum Pengadaannya	SKPD		38		38		38		38	

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggung Jawab
			Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RKT, Perjanjian Kinerja, Renja, Rencana Aksi Kinerja, Reviu Renstra, Reviu/ Perubahan IKU) yang disusun	Dok	18,659,000	8	47,012,373	8	85,000,000	7	90,000,000	7	Subag Penyusunan dan Pengendalian Program
	Jumlah dokumen pengendalian dan realisasi anggaran program dan kegiatan yang disusun	Dok		12		12		12		12	
	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang disusun	Dok		4		4		4		4	
	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah yang disusun	Dok		1		1		1		1	
	Jumlah laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan progres rencana aksi Perangkat Daerah yang disusun	Laporan		1		12		12		12	
	Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah yang disusun	Dok				1		1		1	
Kegiatan Peningkatan Manajemen bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan SDDKN yang disusun	laporan	115,679,600	12	113,800,675	12	200,000,000	12	200,000,000	12	Subag LPSE & Adm. Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek dan asistensi SDDKN	Orang				100					
Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun	Laporan	181,269,800	13	229,174,310	18	230,000,000	18	235,000,000	18	Subag Monev Pembangunan
	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil program/ kegiatan pembangunan yang disusun	Laporan		1		2		2		2	
Keg. Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa	Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa	Orang	723,466,500	430	639,999,900	220	700,000,000	350	750,000,000	350	Subag Pengembangan SDM
	Jumlah laporan Tepra (Progres PBJ Kab. Ktw. Barat) yang disusun	Laporan		12		12		12		12	
	Jumlah bukti dukung variabel penilaian kematangan UKPBJ yang terverifikasi	dokumen				5		9		9	

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggung Jawab
			Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
Keg. Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa	Jumlah kasus/ permasalahan pengadaan barang/jasa (pengaduan, sanggahan dan konsultasi) yang terselesaikan	Kasus	68,200,000	8	133,776,400	12	150,000,000	18	175,000,000	18	Subag Pembinaan PBJ
Keg. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan evaluasi pengadaan barang/ jasa Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun	Laporan	62,400,000	6	61,214,400	12	75,000,000	12	100,000,000	12	Subag Pelaksanaan PBJ
	Jumlah laporan monev PBJ Desa yang disusun	Laporan				6		6		6	
Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah	Jumlah Rancangan Perda dan Perbup yang mendapatkan fasilitasi dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Kepala Daerah	Perda/ Perbup	178,830,000	30	166,999,900	30	200,000,000	50	250,000,000	50	Subag Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Himpunan Perda dan Perbup yang disebarluaskan	buku	53,914,900	50	77,673,830	50	80,000,000	50	90,000,000	50	Subag Evaluasi Sosialisasi & Dok.Produk Hukum
	Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses masyarakat	Perda/ Perbup		30		30		30		30	
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	238,835,000	360	187,326,170	360	200,000,000	6	200,000,000	6	Subag Evaluasi Sosialisasi & Dok.Produk Hukum
	Jumlah Kelompok Kadarkum yang mendapatkan pembinaan	Kelompok		2		2		2		2	
Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah perkara/ permasalahan litigasi/ non litigasi yang ditangani	putusan	479,006,450	4	308,660,400	4	350,000,000	4	350,000,000	4	Subag Bantuan Hukum & Hak Azasi
Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah peserta Diseminasi/ Sosialisasi Hak Asasi Manusia	orang	39,670,000	50	51,500,000	50	80,000,000	50	100,000,000	50	Subag Bantuan Hukum & Hak Azasi
	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Panitia RANHAM dan Pokja	Kali				4		4		4	
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah paket/ surat yang terkirim	Pucuk surat/ kg paket	6,550,000	350	6,046,500	297	7,000,000	300	10,000,000	350	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	5,034,733,960	12	5,399,937,200	12	5,400,000,000	12	5,750,000,000	12	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	353,062,500	721	404,750,000	1934	410,000,000	2000	450,000,000	2100	Subag Rumah Tangga & Aset

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggung Jawab
			Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH, WKDH, pimpinan/anggota DPRD	Jumlah jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH, WKDH yang disediakan	Orang	100,000,000	6	128,000,000	6	130,000,000	10	150,000,000	10	Subag Tata Usaha
Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	Jumlah gedung/barang milik daerah yang diasuransikan	Unit	18,350,000	5	86,520,000	11	95,000,000	12	125,000,000	12	Subag Adm Keuangan
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	61,550,000	88	54,650,000	77	68,000,000	96	75,000,000	96	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Bulan	2,735,304,000	12	2,666,893,500	12	2,667,000,000	12	3,000,000,000	12	Subag Adm Keuangan
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bulan	841,946,000	12	891,402,000	12	900,000,000	12	950,000,000	12	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	unit	106,050,000	109	89,550,000	160	90,000,000	165	125,000,000	175	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	jenis	199,943,475	43	215,572,500	57	400,000,000	60	425,000,000	65	Subag Tata Usaha
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	161,086,150	19	155,005,000	15	160,000,000	20	185,000,000	20	Subag Tata Usaha
Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	72,997,540	35	73,010,000	39	80,000,000	40	100,000,000	40	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	566,550,425	27	348,250,000	15	350,000,000	25	450,000,000	25	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	64,280,000	21	153,200,000	11	175,000,000	15	225,000,000	15	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Orang	1,240,400,000	6811	1,329,840,000	7061	1,350,000,000	7100	1,750,000,000	7500	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	1,180,950,000	288	1,107,950,000	288	1,250,000,000	350	1,500,000,000	350	Subag Tata Usaha
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi KDH/ WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dilaksanakan oleh KDH dan WKDH	kali	765,000,000	51	675,000,000	45	762,000,000	60	825,500,000	65	Subag Tata Usaha
Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun	Unit	5,318,570,000	1	3,546,157,500	1	4,000,000,000	1	2,500,000,000	1	Subag Rumah Tangga & Aset
	Jumlah bangunan penunjang di lokasi Rumah Jabatan yang dibangun/ ditingkatkan kapasitasnya	Unit		1		3		3		1	
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	650,839,100	1	4,722,025,000	1	3,186,416,399	2	4,500,000,000	2	Subag Rumah Tangga & Aset
	Jumlah sarana gedung kantor yang dibangun/ ditingkatkan kapasitasnya	unit		3		3		2		4	
Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	-	-	141,000,000	3	200,000,000	1	200,000,000	1	Subag Tata Usaha
Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	jenis	324,845,000	13	-	-	200,000,000	10	350,000,000	10	Subag Rumah Tangga & Aset

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggung Jawab
			Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	jenis	-	-	32,100,800	4	50,000,000	5	75,000,000	5	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	jenis	736,887,400	2	304,250,000	5	310,000,000	10	375,000,000	10	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	jenis	-	-	-	0	200,000,000	10	350,000,000	10	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	jenis	333,188,600	12	438,400,000	11	450,000,000	13	475,000,000	15	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/ berkala	unit	110,200,000	2	113,500,000	2	125,000,000	2	135,000,000	2	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/ berkala	unit	-	-	-	-	125,000,000	2	125,000,000	2	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	Unit	338,415,800	1	297,947,000	4	300,000,000	4	325,000,000	4	Subag Rumah Tangga & Aset
	Jumlah sarana/ prasarana gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	unit		21		21		25		25	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/ berkala	unit	206,400,000	4	206,400,000	4	210,000,000	4	215,000,000	4	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/ berkala	unit	428,970,000	35	500,600,000	50	510,000,000	89	575,000,000	89	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	jenis			33,250,000	5	50,000,000	6	60,000,000	7	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	jenis	124,040,000	121	122,000,000	6	125,000,000	6	175,000,000	8	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	unit	158,500,000	2	231,000,000	2	300,000,000	3	325,000,000	3	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	unit	903,000,000	2	535,000,000	3	550,000,000	3	800,000,000	4	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	unit	-	-	-	-	100,000,000	1			Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama	Jumlah perlengkapan gedung asrama yang diadakan	jenis	37,000,000	2	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan penyediaan jasa sewa asrama mahasiswa	Jumlah asrama mahasiswa yang disewa	unit per tahun	380,000,000	7	405,000,000	7	425,000,000	7	450,000,000	7	Subag Adm Keuangan
Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung asrama	Jumlah gedung asrama yang direhabilitasi sedang/berat	unit per tahun	292,805,000	2	349,947,000	2	396,000,000	2	300,000,000	2	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Laporan	3,000,000	2	3,000,000	2	3,500,000	2	4,000,000	2	Subag Adm Keuangan
Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	47,770,000	2	60,000,000	2	60,000,000	2	60,000,000	2	Subag Adm Keuangan
Kegiatan Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Jumlah mesin/ kartu absensi yang diadakan	unit	-	-	-	-	25,000,000	2	30,000,000	2	Subag Tata Usaha

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggung Jawab
			Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stel	256,500,000	404	57,500,000	40	200,000,000	219	200,000,000	219	Subag Tata Usaha
Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	stel	70,000,000	28	300,000,000	428	150,000,000	227	175,000,000	227	Subag Tata Usaha
Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dan pelatihan	OK	479,000,000	56	319,500,000	40	400,000,000	42	425,000,000	42	Subag Tata Usaha
Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumentasi Naskah Sambutan/ Pidato Bupati yang dikumpulkan	buku	57,500,100	200	57,500,000	200	70,000,000	200	75,000,000	200	Subag Pengumpulan & Penyaringan Informasi
	Jumlah dokumentasi data dan informasi dari media dalam bentuk kliping	exp		365		365		365		365	
Kegiatan Peliputan dan publikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan dan luar daerah	kali	349,499,900	12	350,000,000	17	400,000,000	20	425,000,000	25	Subag Peliputan & Publikasi
	Jumlah kegiatan pameran pembangunan/ publikasi pemerintah daerah yang diikuti	kali		1		1		1		1	
	Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk buletin, album, DVD, spanduk dan sejenisnya	Jenis		8		9		9		9	
Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat yang difasilitasi	kali	995,845,000	24	600,000,000	24	625,000,000	24	799,193,827	24	Subag Rumah Tangga & Aset
Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri yang diterima	kali	491,000,000	30	491,000,000	30	500,000,000	30	515,000,000	30	Subag Protokol
Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	kali	297,500,000	80	303,500,000	80	325,000,000	80	335,000,000	80	Subag Protokol
Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah jasa keprotokolan yang dilaksanakan	kali	101,700,000	12	95,700,000	10	100,000,000	10	115,000,000	10	Subag Protokol
Pemantauan dan Evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah	jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah yang dihasilkan	dokumen	70,914,800	4	70,565,625	6	80,000,000	6	90,000,000	6	Subag Pengembangan Ekonomi & Potensi Daerah

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggung Jawab
			Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
Pengendalian dan pemantauan sarana perekonomian	Jumlah laporan pengendalian dan pemantauan sarana perekonomian yang ditindaklanjuti	dokumen	49,574,000	6	49,573,752	6	60,000,000	6	70,000,000	6	Subag Promosi, Investasi, Pengendalian & Sarana Perekonomian
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Tenaga Listrik	Jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 kecamatan Kab. Kobar	unit/ tiang	1,837,920,000	238	4,038,500,000	467	4,000,000,000	500	5,000,000,000	500	Subag Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup,Produksi & Budidaya
	Jumlah database PJU yang disusun	Dokumen				1					
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan data potensi sumber daya alam yang dihasilkan	laporan	51,815,000	2	59,590,000	6	70,000,000	6	80,000,000	6	Subag Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup,Produksi & Budidaya
Kegiatan Pelayanan, pembinaan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan	Jumlah calon/ jemaah haji yang dapat terlayani	orang	5,631,950,000	160	6,119,264,000	160	6,500,000,000	160	7,000,000,000	160	Subag Pembinaan Mental Spiritual
	Jumlah penghulu Non PNS yang diberikan insentif	orang		25		24		24		24	
	Jumlah laporan Rumah Ibadah yang dimonitoring dan dievaluasi	Dok		0		0		1		1	
	Jumlah Guru Ngaji yang diberikan insentif	orang		274		300		400		500	
	Jumlah dialog antar tokoh agama	kali		0		0		1		1	
	Jumlah desa di Kecamatan yang dikunjungi dalam kegiatan safari ramadhan	desa		6		6		6		6	
	Jumlah rumah ibadah dan rukun kematian yang akan mendapatkan bantuan peralatan dan perlengkapan ibadah	Rumah ibadah dan RK		0		0		6		6	
	Jumlah Pemuda yang mengikuti sosialisasi keagamaan	orang		0		0		200		200	
	Jumlah ASN yang mengikuti pengajian	orang		0		0		0		0	
	Jumlah peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan	kali		0		0		0		0	
	Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan	kegiatan		1		1		1		1	
	Jumlah Guru Mengaji yang mendapatkan pelatihan	Orang		0		300					
	Jumlah kegiatan LPTQ/MTQ yang dilaksanakan	kegiatan		3		3		3		3	
	Jumlah tokoh agama non muslim yang diberikan insentif	Orang		0		123		123		123	
Kegiatan Penyusunan bahan Kebijakan dan peningkatan kesadaran Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan bahan kebijakan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	Dok	157,499,900	1	163,134,400	1	175,000,000	1	185,000,000	1	Subag Pembinaan Kesehatan & Kesejahteraan Sosial

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggung Jawab
			Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
	Jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	dokumen		3		3		3		3	
	Jumlah penilaian Lomba Sekolah Sehat	sekolah		24		24		24		24	
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kemasyarakatan	Jumlah laporan monev lembaga kemasyarakatan yang disusun	dokumen	45,979,800	1	45,910,800	1	60,000,000	1	70,000,000	1	Subag Pembinaan Kemasyarakatan
	Jumlah dokumen lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan/ hibah	dokumen/ SK		1		1		1		1	
					42,526,283,000		44,679,916,399		49,328,693,827		

Pangkalan Bun, September 2019
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

SUYANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 199203 1 009